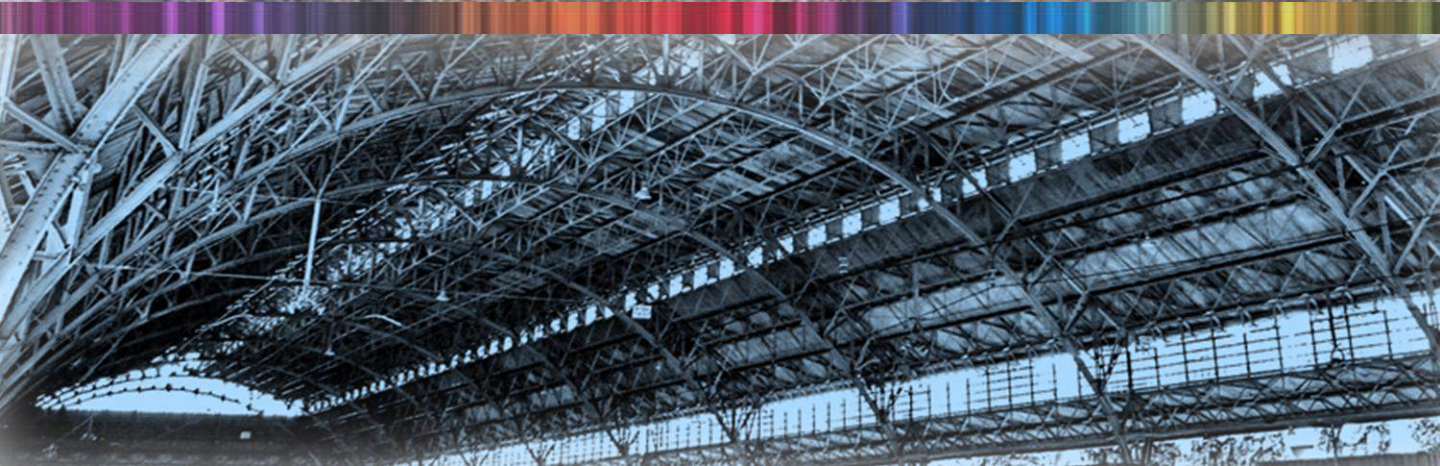




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DITJEN PERKERETAAPIAN

Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia



Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan telah dilakukan revisi berdasarkan perkembangan yang sangat dinamis dalam periode tahun 2016. Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan acuan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016 berdasarkan periode pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2016 ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada masa mendatang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah termasuk peran dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, untuk menuju sistem perencanaan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkeretaapian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016.

Jakarta, Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



PRASETYO BOEDITJAHJONO

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19591121 198603 1 003

RINGKASAN IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator bidang perkeretaapian mempunyai tugas untuk menata penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh guna memastikan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan memiliki Visi mewujudkan eksistensi sebagai regulator dan penyelenggaraan perkeretaapian multioperator guna terselenggaranya pelayanan angkutan kereta api secara massal yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, cepat dan lancar, tertib dan teratur, efisien, terpadu dengan moda transportasi lain, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian;
2. Mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian multi operator dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan swasta;
3. Meningkatkan peran Kereta Api sebagai angkutan publik;
4. Meningkatkan peran Kereta Api sebagai tulang punggung angkutan barang;
5. Meningkatkan peran Kereta Api sebagai pelopor terciptanya angkutan terpadu.

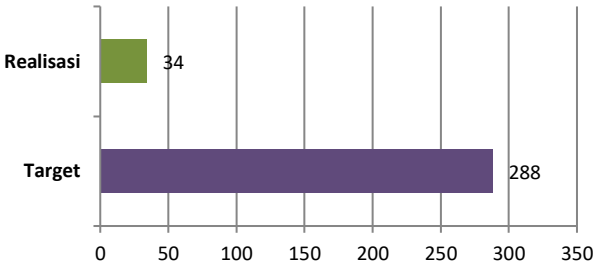
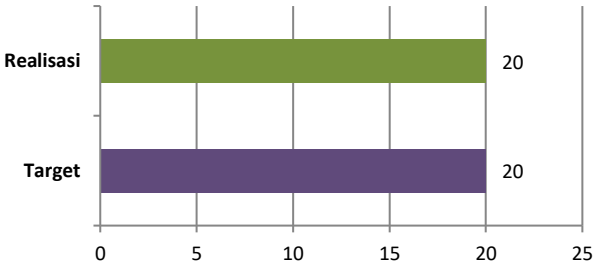
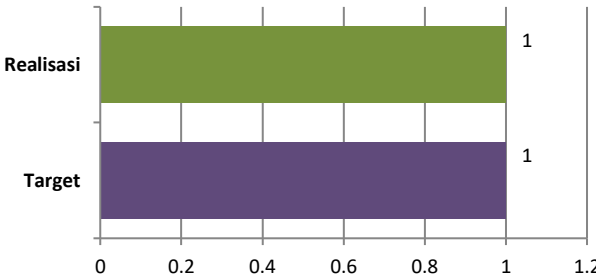
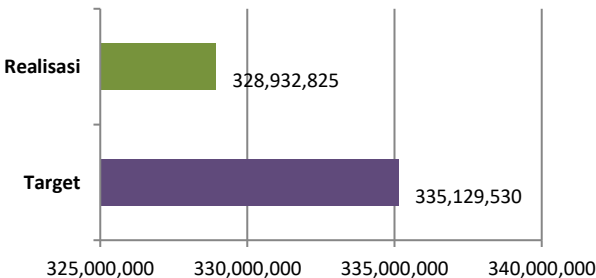
Untuk memastikan terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut di atas maka telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja pelaksanaan pembangunan perkeretaapian. Sesuai dengan dokumen Revisi Penjanjian Kinerja 2016 telah ditetapkan target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut.

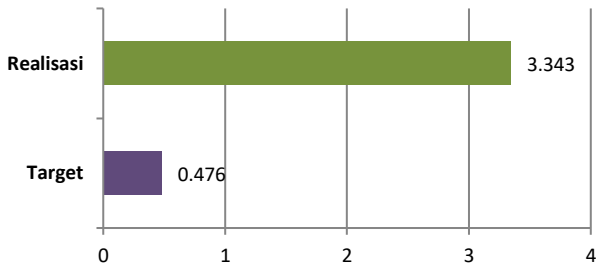
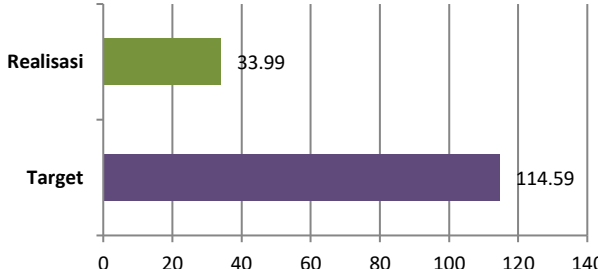
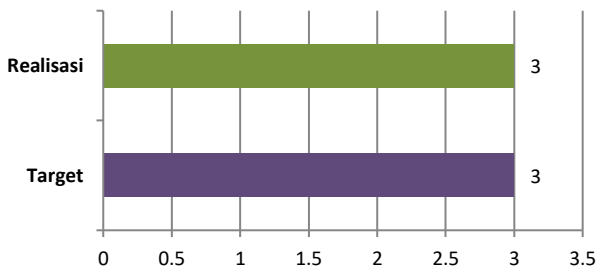
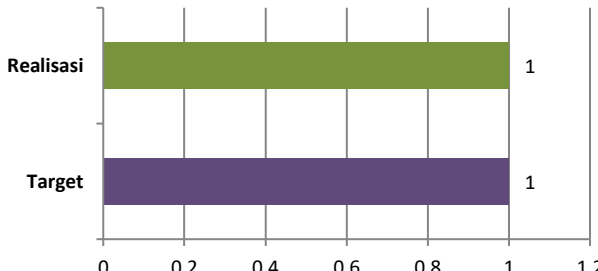
No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1)	Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional	0,55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km

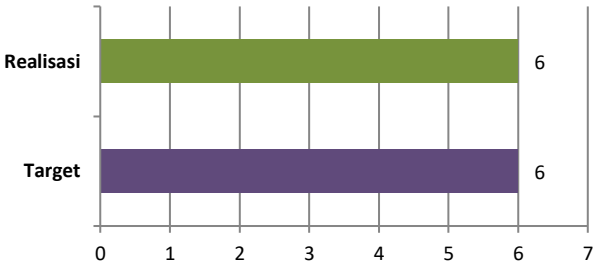
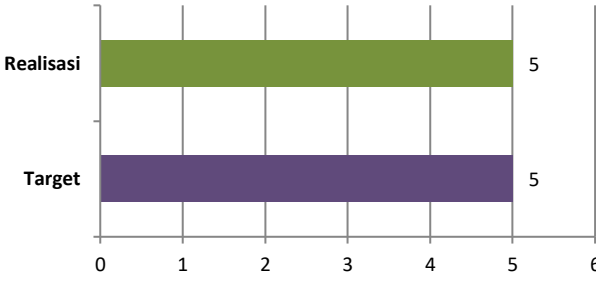
No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
		2)	Jumlah pedoman standar keselamatan	0 dok
		3)	Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	1 unit
		4)	Tingkat Ketersediaan ATP	0 unit
		5)	Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	3 Lokasi
		6)	Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	4.448 Sertifikat
2	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	7)	Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian (pelemparan batu)	288 Jumlah Kejadian /Tahun
3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	8)	Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)	0 Dokumen
4	Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan <i>good governance</i>	9)	Jumlah penyederhanaan perijinan Transportasi perkeretaapian	20 Prosentase (%)
		10)	Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	1 Tahun
		11)	Jumlah Penumpang KA PSO	335.129.530 Penumpang
5	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.	12)	Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	0,476 Juta ton CO ₂ e
		13)	Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	0 Lokasi
6	Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional	14)	Terbangunnya jalur kereta api	114,59 Km'sp
		15)	Jumlah sarana kereta api	3 Unit
		16)	Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	1 Proyek
7	Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	17)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis	6 Trayek/ Lintas/ Rute
		18)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis menjadi komersial	0 Trayek/ Lintas/ Rute
8	Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel	19)	Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api	5 Lokasi

Hasil pengukuran kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CAPAIAN KINERJA 2016	PROSENTASE %
Sasaran 1 : Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian		
IKU 1: Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (Ratio kecelakaan/ 1 juta km)	Realisasi: 0.24 Target: 0.55	156,36%
IKU 2 : Jumlah pedoman standar keselamatan (Dokumen)	-Tidak ditetapkan target- (Target telah tercapai pada tahun sebelumnya)	-
IKU 3 : Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian (unit)	Realisasi: 1 Target: 1	100%
IKU 4 : Tingkat Ketersediaan ATP (unit)	-Tidak ditetapkan target-	-
IKU 5 : Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang (lokasi)	Realisasi: 3 Target: 3	61,76%
IKU 6 : Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian (Sertifikat)	Realisasi: 3213 Target: 4448	72,23%

Sasaran 2 : Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian		
IKU 7 : Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu) (Jumlah Kejadian /Tahun)	 Realisasi: 34 Target: 288	188,19%
Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian		
IKU 8 : Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) (Dokumen)	-Tidak ditetapkan target- (Target telah tercapai pada tahun sebelumnya)	-
Sasaran 4 : Meningkatkan kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan good governance		
IKU 9 : Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Prosentase (%))	 Realisasi: 20 Target: 20	100%
IKU 10: Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) (tahun)	 Realisasi: 1 Target: 1	100%
IKU 11 : Jumlah penumpang KA PSO (penumpang)	 Realisasi: 328,932,825 Target: 335,129,530	98,15%

Sasaran 5 : Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi perkeretaapian								
IKU 12 : Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan (Juta ton CO2e)	 <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Realisasi</td><td>3.343</td></tr><tr><td>Target</td><td>0.476</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Realisasi	3.343	Target	0.476	702,31%
Kategori	Nilai							
Realisasi	3.343							
Target	0.476							
IKU 13 : Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan (Lokasi)	-Tidak ditetapkan target-							
Sasaran 6 : Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional								
IKU 14 : Terbangunnya jalur Kereta Api (Km'sp)	 <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Realisasi</td><td>33.99</td></tr><tr><td>Target</td><td>114.59</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Realisasi	33.99	Target	114.59	29,66%
Kategori	Nilai							
Realisasi	33.99							
Target	114.59							
IKU 15 : Jumlah sarana kereta api (unit)	 <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Realisasi</td><td>3</td></tr><tr><td>Target</td><td>3</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Realisasi	3	Target	3	100%
Kategori	Nilai							
Realisasi	3							
Target	3							
IKU 16 : Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian. (proyek)	 <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Realisasi</td><td>1</td></tr><tr><td>Target</td><td>1</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Realisasi	1	Target	1	100%
Kategori	Nilai							
Realisasi	1							
Target	1							

Sasaran 7 : Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api		
IKU 17 : Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api. (Trayek/ Lintas/ Rute)	 Realisasi: 6 Target: 6	100%
IKU 18 : Jumlah lintasan/rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial (Trayek/ Lintas/ Rute)	-Tidak ditetapkan target-	
Sasaran 8 : Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel		
IKU 19 : Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api (lokasi)	 Realisasi: 5 Target: 5	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis		98,34%

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	I-3
1.3. Struktur Organisasi	I-4
a. Visi dan Misi	I-4
b. Tujuan	I-4
c. Sasaran	I-5
1.4. Sumber Daya Manusia	I-10
1.5. Isu strategis dan Permasalahan yang dihadapi	I-21
a. <i>Grand Strategy</i> Organisasi	I-21
b. Kebijakan Umum	I-22
1.6. Sistematika Laporan	I-23
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Kinerja Tahun 2016	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	II-5
2.3 Perubahan Alokasi Anggaran	II-8
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metode Pengukuran Kinerja	III-1
B. Pencapaian Kinerja	III-1
1. Capaian Indikator Kinerja Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api.	III-2

2. Capaian Indikator Kinerja Jumlah pedoman standar keselamatan	III-5
3. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	III-6
4. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan ATP	III-7
5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	III-8
6. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	III-10
7. Capaian Indikator Kinerja Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)	III-12
8. Capaian Indikator Kinerja Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)	III-14
9. Capaian Indikator Kinerja Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	III-15
10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	III-17
11. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang KA Public Service Obligation (PSO)	III-23
12. Capaian Indikator Kinerja Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang diturunkan.	III-25
13. Capaian Indikator Kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	III-29

14. Capaian Indikator Kinerja Terbangunnya jalur kereta api	III-29
15. Capaian Indikator Kinerja Jumlah sarana kereta api	III-33
16. Capaian Indikator Kinerja Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	III-35
17. Capaian Indikator Kinerja Jumlah lintasan/rute angkutan perintis kereta api	III-38
18. Capaian Indikator Kinerja Jumlah lintasan/rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial	III-44
19. Capaian Indikator Kinerja Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api	III-45
C. Realisasi Anggaran	III-48
 BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-3
 Lampiran :	
A. Rencana Strategis (RS) 2015 - 2019 Ditjen Perkeretaapian	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016	
C. Capaian Pengukuran Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016	
D. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian Triwulan Tahun 2016	

Daftar Gambar

			Halaman
Gambar	1.1	Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian	I-7
Gambar	1.1	Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I	I-8
Gambar	1.2	Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II	I-8
Gambar	1.3	Sumber Daya Manusia Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Berdasarkan Unit Kerja	I-10
Gambar	1.4	Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian	I-9
Gambar	1.5	Struktur Organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian	I-9
Gambar	1.2	Komposisi Pegawai Setditjen Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat golongan/kepankatan	I-11
Gambar	1.3	Komposisi Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat golongan/ kepankatan	I-13
Gambar	1.4	Komposisi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat golongan/ kepankatan	I-15
Gambar	1.5	Komposisi Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat golongan/ kepankatan	I-17
Gambar	1.6	Komposisi Pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat golongan/ kepankatan	I-20
Gambar	1.7	Diagram Alur Grand Strategy Pembangunan perkeretaapian Indonesia	I-21
Gambar	3.1	Capaian Realisasi IKU No.1 Tahun 2016 Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	III-3
Gambar	3.2	Capaian Realisasi IKU No.2 Tahun 2016 Jumlah pedoman standar keselamatan	III-5

			Halaman
Gambar	3.3	Capaian Realisasi IKU No.3 Tahun 2016 Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	III-6
Gambar	3.4	Capaian Realisasi IKU No.4 Tahun 2016 Tingkat Ketersediaan ATP	III-8
Gambar	3.5	Capaian Realisasi IKU No.5 Tahun 2016 Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	III-9
Gambar	3.6	Capaian Realisasi IKU No.6 Tahun 2016 Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	III-11
Gambar	3.7	Capaian Realisasi IKU No.7 Tahun 2016 Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)	III-13
Gambar	3.8	Capaian Realisasi IKU No.8 Tahun 2016 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian	III-14
Gambar	3.9	Capaian Realisasi IKU No.9 Tahun 2016 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	III-16
Gambar	3.10	Capaian Realisasi IKU No.10 Tahun 2016 Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	III-19
Gambar	3.11	Capaian Realisasi IKU No.11 Tahun 2016 Jumlah penumpang KA PSO	III-24
Gambar	3.12	Capaian Realisasi IKU No.12 Tahun 2016 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	III-26
Gambar	3.13	Capaian Realisasi IKU No.14 Tahun 2016 Terbangunnya jalur Kereta Api milik negara (IMO)	III-30
Gambar	3.14	Capaian Realisasi IKU No.15 Tahun 2016 Jumlah sarana kereta api	III-34

				Halaman
Gambar	3.15	Capaian Realisasi IKU No.16 Tahun 2016 Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian		III-36
Gambar	3.16	Capaian Realisasi IKU No.17 Tahun 2016 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api		III-39
Gambar	3.17	Capaian Realisasi IKU No.19 Tahun 2016 Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api		III-45

Daftar Tabel

			Halaman
Tabel	2.1	Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016	II-1
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016	II-5
Tabel	2.3	Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016	II-6
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2016	III-2
Tabel	3.2	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.3	III-4
Tabel	3.3	Capaian Kinerja Jumlah pedoman standar keselamatan Tahun 2016	III-5
Tabel	3.4	Capaian Kinerja Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian Tahun 2016	III-6
Tabel	3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.3	III-7
Tabel	3.6	Capaian Kinerja Tingkat Ketersediaan ATP Tahun 2016	III-8
Tabel	3.7	Capaian Kinerja Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	III-9
Tabel	3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.5	III-10
Tabel	3.9	Capaian Kinerja Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian Tahun 2016	III-11
Tabel	3.10	Capaian Kinerja Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu) Tahun 2016	III-12

Tabel	3.11	Capaian Kinerja Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) Tahun 2016	III-14
Tabel	3.12	Capaian Kinerja Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016	III-15
Tabel	3.13	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.9	III-17
Tabel	3.14	Capaian Kinerja Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	III-17
Tabel	3.15	Lokasi Kegiatan IMO Tahun 2016	III-18
Tabel	3.16	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.9	III-22
Tabel	3.17	Capaian Kinerja Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2016	III-23
Tabel	3.18	Capaian Kinerja Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan Tahun 2016	III-25
Tabel	3.19	Capaian Kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan Tahun 2016	III-29
Tabel	3.20	Capaian Kinerja Terbangunnya jalur kereta api Tahun 2016 terhadap Target pada Reviu Perjanjian Kinerja 2016	III-29
Tabel	3.21	Target Pembangunan Jalur KA sepanjang 114,59 km	III-30
Tabel	3.22	Realisasi Pembangunan Jalur KA sepanjang 33,99 km	III-31
Tabel	3.23	Kegiatan Pembangunan Jalur KA yang Belum Tercapai pada Tahun 2016	III-32
Tabel	3.24	Capaian Kinerja Jumlah sarana kereta api	III-33
Tabel	3.25	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.13	III-35

Tabel	3.26	Capaian Kinerja Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	III-35
Tabel	3.27	Capaian Kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api Tahun 2016	III-38
Tabel	3.28	Realisasi KA Perintis Cut Mutia Aceh	III-40
Tabel	3.29	Realisasi KA Perintis Lembah Anai Sumatera Barat	III-41
Tabel	3.30	Realisasi KA Perintis Kertalaya Sumsel	III-41
Tabel	3.31	Realisasi KA Perintis Siliwangi Jawa Barat	III-42
Tabel	3.32	Realisasi KA Perintis Batara Kresna Jawa Tengah	III-43
Tabel	3.33	Realisasi KA Perintis Jenggala Jawa Timur	III-43
Tabel	3.34	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.15	III-44
Tabel	3.35	Capaian Kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial	III-44
Tabel	3.36	Capaian Kinerja Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api Tahun 2016	III-45
Tabel	3.37	Rincian Dana Tidak Terserap Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016	III-49

Daftar Lampiran

- Lampiran :
- A. Rencana Strategis (RS) 2015 - 2019 Ditjen Perkeretaapian
 - B. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016
 - C. Capaian Pengukuran Kinerja (PKK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016
 - D. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian Triwulanan Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan transportasi kereta api yang handal dan layak operasi maka diperlukan investasi yang relatif cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan daya dukung prasarana dan sarana kereta api, baik melalui pembiayaan Pemerintah maupun Swasta. Mengingat transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan transportasi tersebut khususnya transportasi kereta api baik melalui mekanisme pembiayaan APBN atau APBD, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Swasta sepenuhnya.

Transportasi kereta api yang handal dan layak operasi tersebut, saat ini sektor transportasi perkeretaapian terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun secara regulasi bidang perkeretaapian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maka sistem penyelenggaraan perkeretaapian yang sebelumnya masih bersifat sentralistik dan monopolistik berubah menjadi bersifat multioperator yaitu dengan memberikan peningkatan peran swasta dan pemerintah daerah secara luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Program Prioritas Infrastruktur Pembangunan Nasional yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian seperti diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) tahun 2030 yang mempunyai peran dan andil untuk meningkatkan serta mendorong perekonomian Nasional.

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian didanai berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan terdapat beberapa kegiatan yang didanai oleh PLN (Pinjaman Luar Negeri), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/SUKUK). Guna mengetahui capaian pelaksanaan pembangunan tersebut terhadap seluruh kinerja perkeretaapian, tentunya diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka

menemukan hasil capaian dan permasalahan yang ada yang akan dapat meningkatkan hasil kinerja dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai wakil Pemerintah Pusat yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (publik) serta kualitas dan kinerja Instansi Pemerintah yang baik, termasuk didalamnya aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun secara manajerial kepemimpinan melalui aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja Direktorat Jenderal perkeretaapian tersebut, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2016 sebagai wujud capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2016, hal ini berdasarkan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan diawal dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016 yang di revisi menjadi Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016. Komitmen dimaksud merupakan amanat dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis tahun 2015-2019.

Pemenuhan sasaran strategis dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun Anggaran 2016 dengan membandingkan dari Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA TA.2016, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas pokoknya Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

a. Visi dan Misi

Visi Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan adalah :

Mewujudkan eksistensi sebagai regulator dan penyelenggaraan perkeretaapian multioperator guna terselenggaranya pelayanan angkutan kereta api secara massal yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, cepat dan lancar, tertib dan teratur, efisien, terpadu dengan moda transportasi lain, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian multioperator dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan Swasta;
- 3) Meningkatkan peran Kereta Api sebagai angkutan publik;
- 4) Meningkatkan peran Kereta Api sebagai tulang punggung angkutan barang;
- 5) Meningkatkan peran Kereta Api sebagai pelopor terciptanya angkutan terpadu.

b. Tujuan

Tujuan Pembangunan Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian multioperator dengan Pemerintah sebagai regulator dan keterlibatan Pemerintah Daerah serta Swasta dalam penyelenggaraannya;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang efektif dengan peningkatan aksesibilitas, keandalan dan kapabilitas prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien dengan maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian
- 2) Meningkatnya keandalan dan keselamatan pengoperasian perkeretaapian.
- 3) Meningkatnya aksesibilitas dan kinerja pelayanan angkutan kereta api.

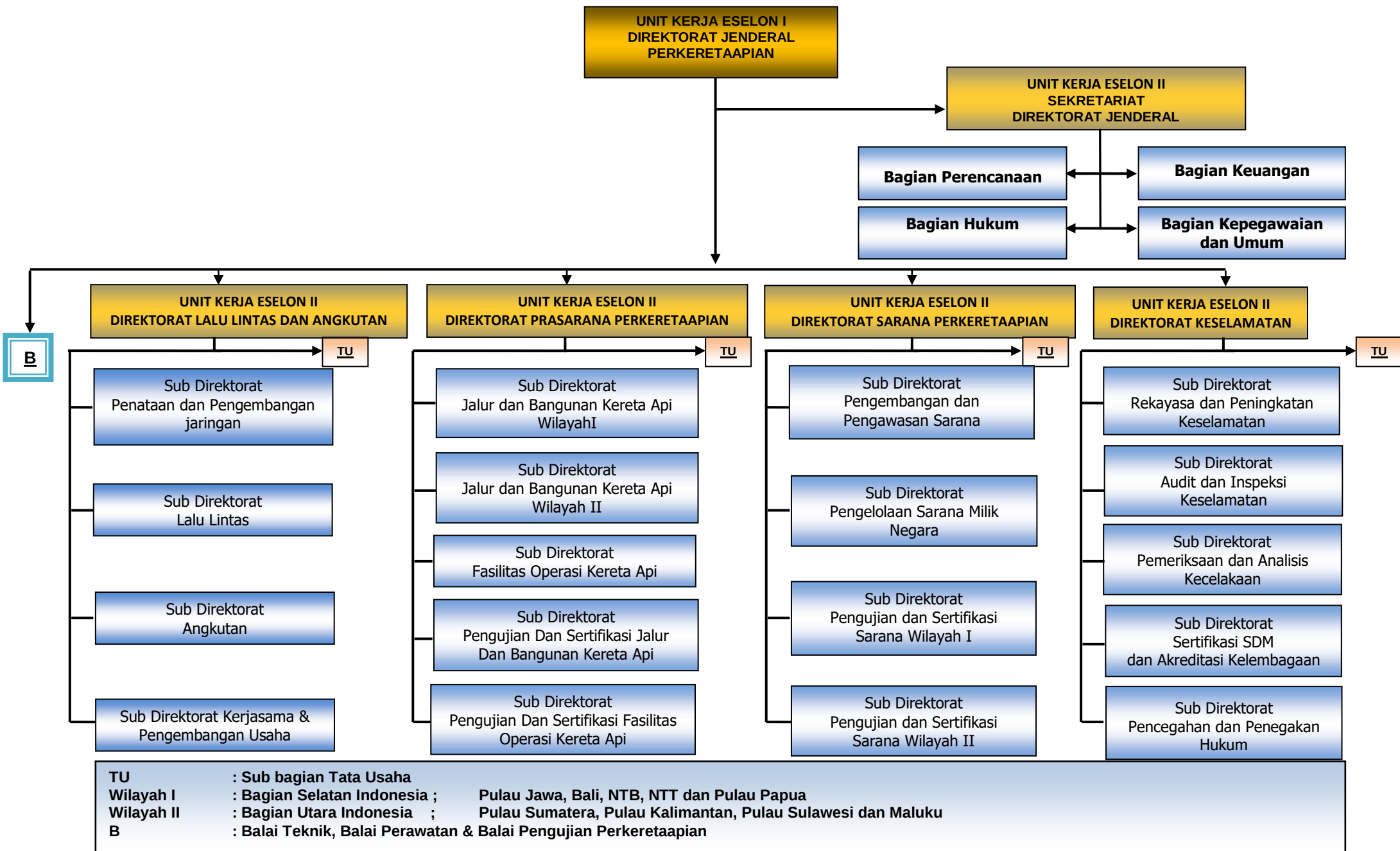
d. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- 3) Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- 4) Direktorat Sarana Perkeretaapian;
- 5) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten;
 - b) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;
 - c) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah;
 - d) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur;
 - e) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara;
 - f) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat;
 - g) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
 - h) Balai Pengujian Perkeretaapian; dan
 - i) Balai Perawatan Perkeretaapian.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Untuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian sedangkan Organisasi dan Tata

Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian dan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 s.d 1.5 berikut ini :



Gambar Diagram 1.1.
Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian



Gambar Diagram 1.2 : Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I



Gambar Diagram 1.3 : Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II



Gambar Diagram 1.4 : Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian



Gambar Diagram 1.5 : Struktur Organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan Tahun 2016 berjumlah 594 dengan rincian 346 pegawai dikantor pusat dan 248 pegawai tersebar di Balai Perkeretaapian sebagaimana diuraikan berikut ini :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

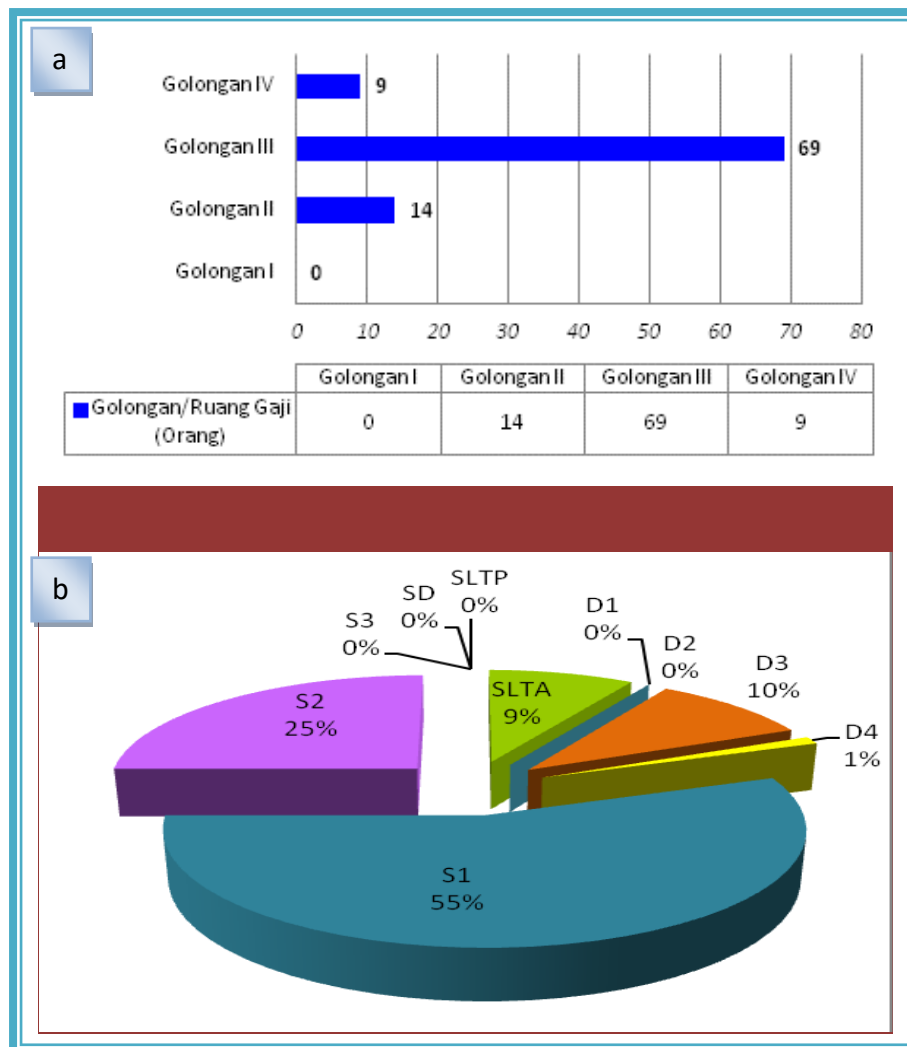
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana dan program pengembangan perkeretaapian, penyusunan data dan informasi serta pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 3) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan transportasi perkeretaapian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerjasama luar negeri;
- 4) Penyiapan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- 5) Penyiapan penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri atas:

- 1) Bagian Perencanaan;
- 2) Bagian Keuangan;
- 3) Bagian Hukum; dan
- 4) Bagian Kepegawaian dan Umum.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2016 secara total pegawai 92 Orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Setditjen Perkeretaapian
berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian.

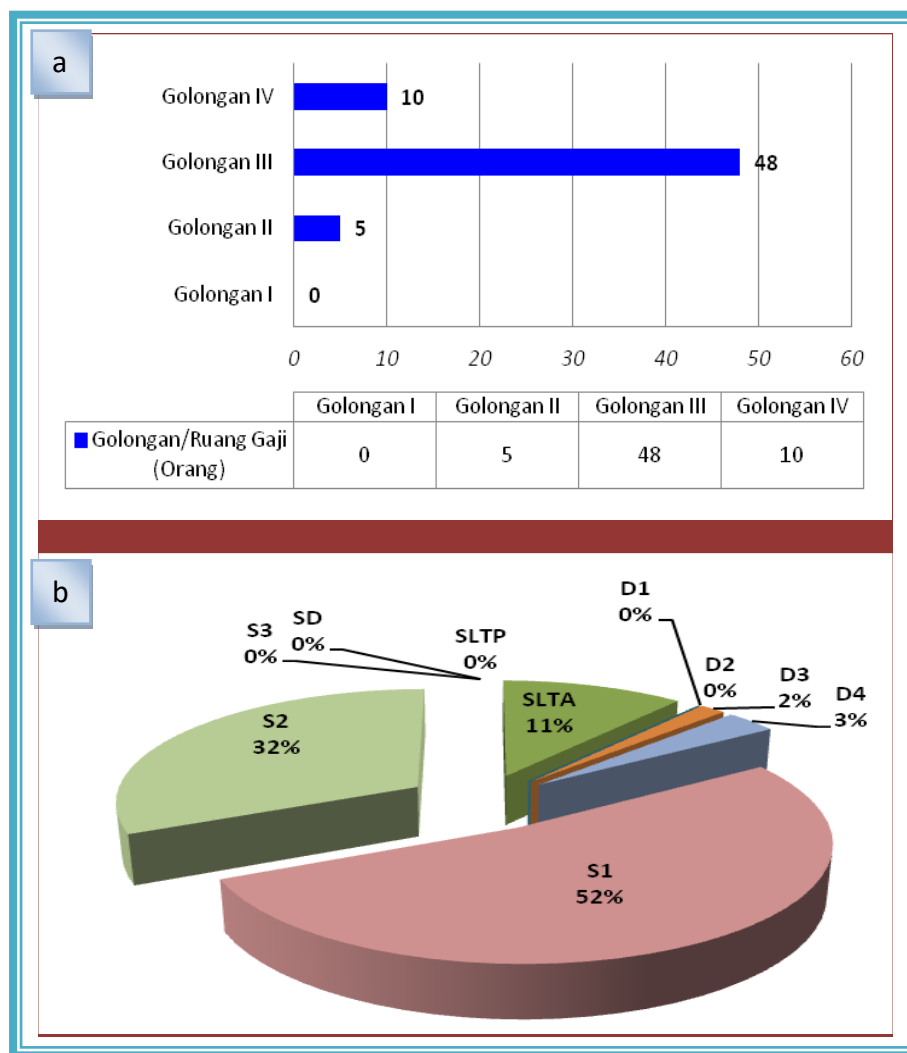
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 2) Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan serta rencana jaringan pelayanan perkeretaapian;
- 5) Penyiapan penyusunan bahan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian;
- 6) Penyiapan bahan perumusan pedoman perhitungan, pelaksanaan dan evaluasi biaya penggunaan, dan pengelolaan prasarana perkeretaapian;
- 7) Penyiapan pelaksanaan penetapan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, izin usaha, izin operasi, dan izin lintas pelayanan di bidang perkeretaapian;
- 8) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian; dan
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan;
- 2) Subdirektorat Lalu Lintas;
- 3) Subdirektorat Angkutan;
- 4) Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tahun 2016 secara total pegawai 63 orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

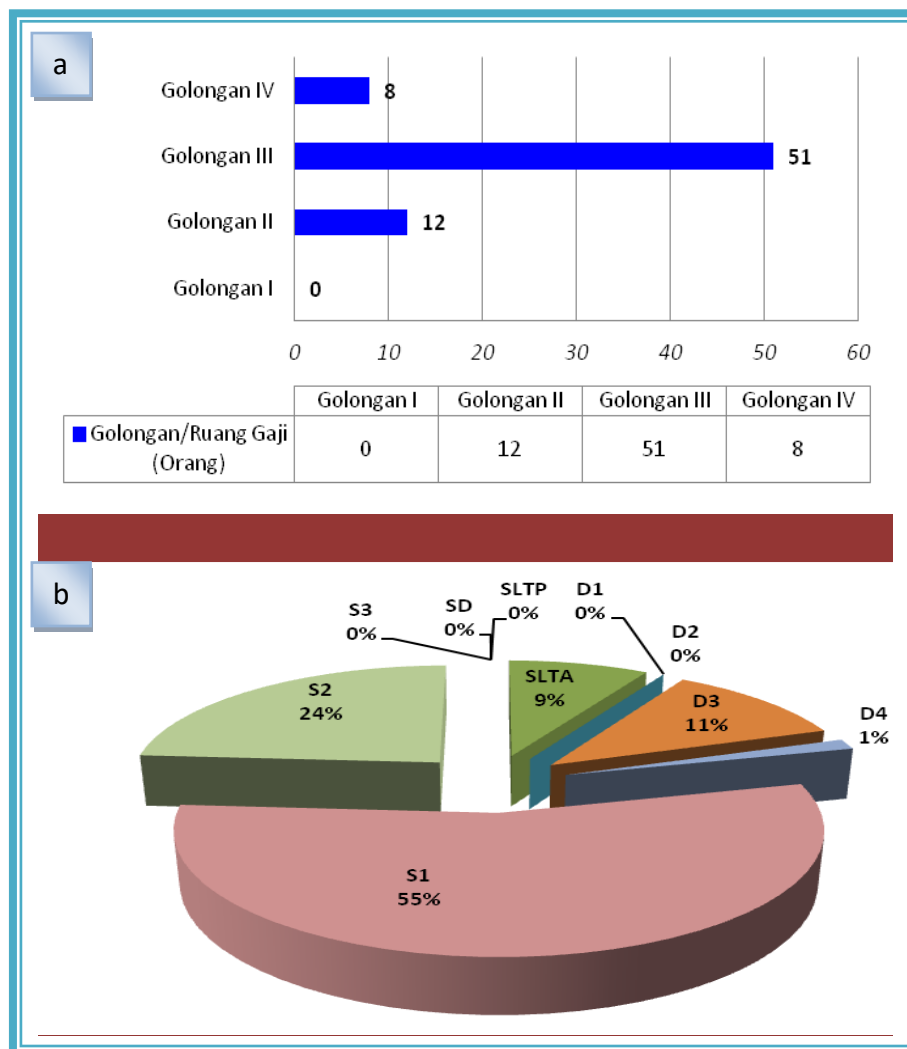
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api; perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- 2) Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- 3) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- 5) Penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan prasarana termasuk material baru dan akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi prasarana perkeretaapian;
- 6) Penyiapan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi pembangunan, perawatan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian serta pengusahaan prasarana perkeretaapian milik negara;
- 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta pengujian prasarana perkeretaapian; dan
- 8) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terdiri atas :

- 1) Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;
- 2) Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;
- 3) Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;
- 4) Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- 5) Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

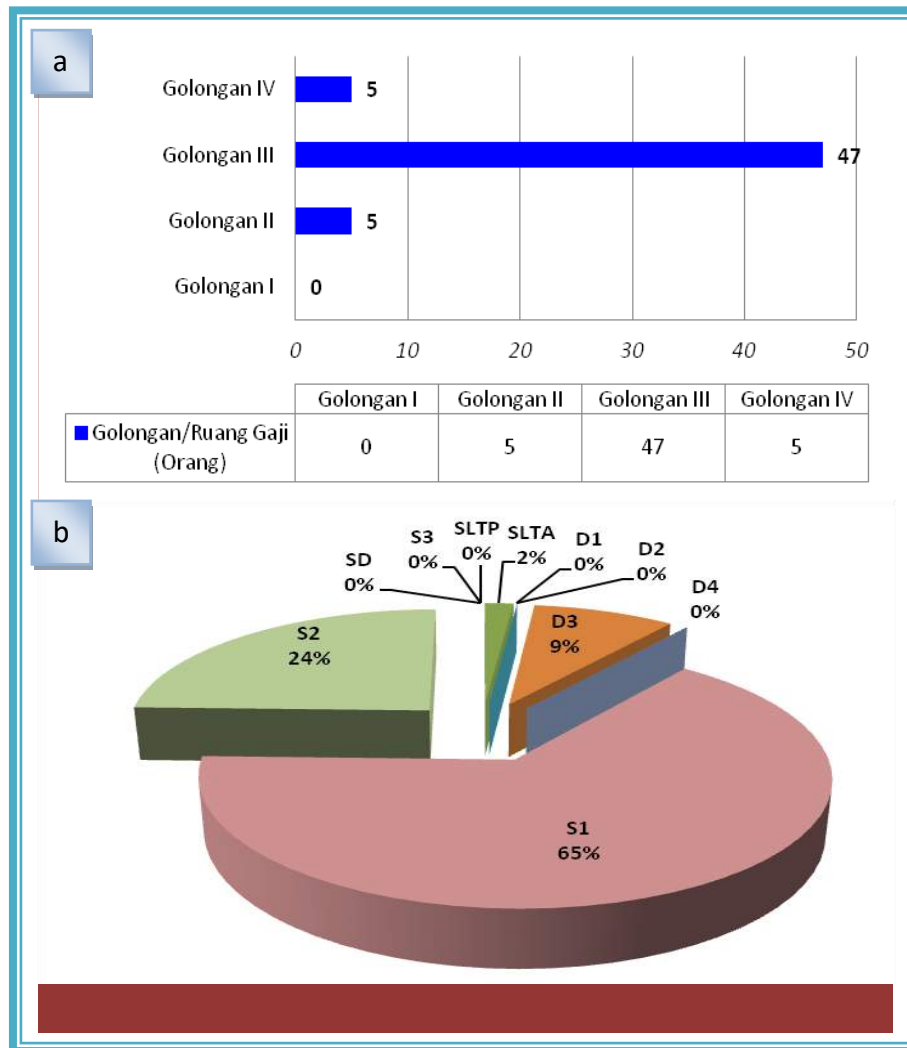
Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2016 secara total pegawai 71 orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut



Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

d. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2016 terdiri dari 57 Orang, dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan/kepankangan digambarkan dibawah ini.



Gambar 1.5
Komposisi Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian
berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepankangan (b)

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai 4 Eselon III dan 1 Eselon IV, terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;

- 2) Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- 3) Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I;
- 4) Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- 2) Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- 3) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana;
- 5) Penyiapan pengembangan sistem informasi sarana;
- 6) Penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas sarana;
- 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana; dan
- 8) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

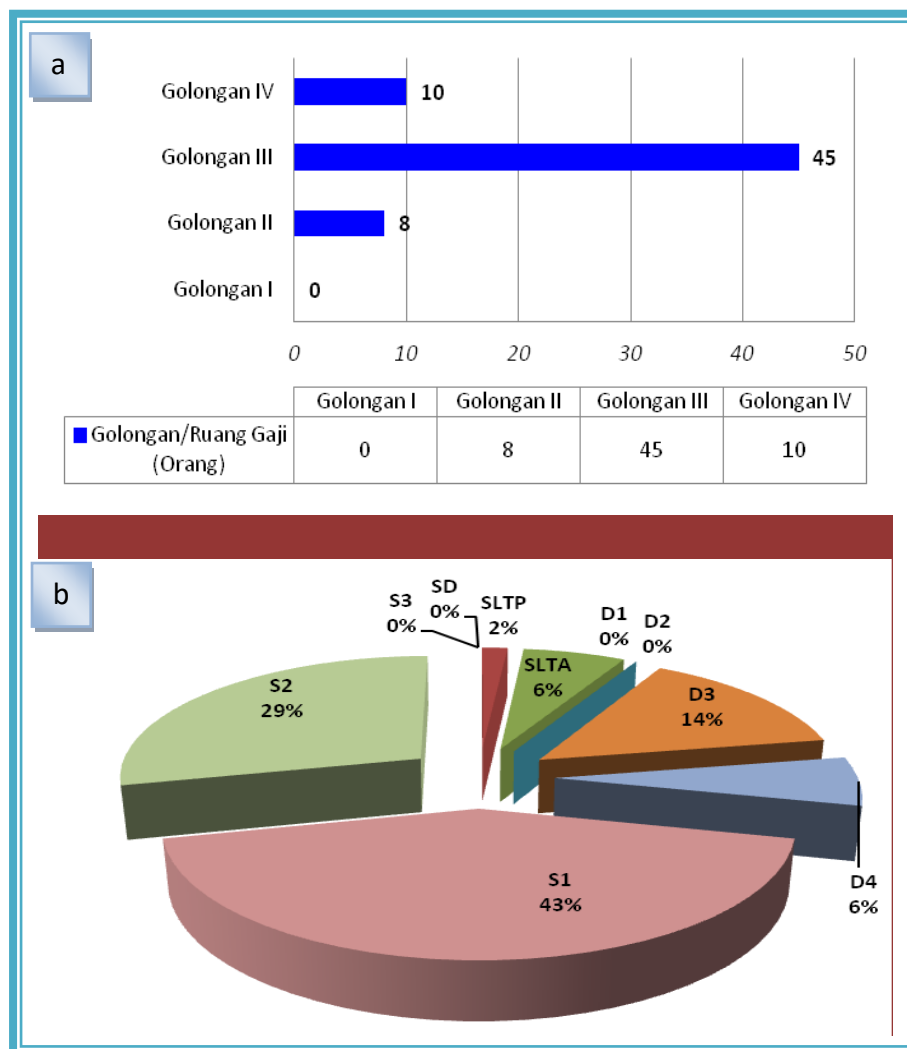
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;

- 2) Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- 3) Penyiapan perumusan dan pembinaan teknis di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 5) Penyiapan pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian;
- 6) Penyiapan pelaksanaan analisis perkembangan kondisi keselamatan perkeretaapian;
- 7) Penyiapan pemeriksaan dan audit keselamatan terhadap penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan perkeretaapian;
- 8) Penyiapan pelaksanaan promosi keselamatan melalui diseminasi hal-hal khusus tentang keselamatan, dalam bentuk seminar, kampanye keselamatan;
- 9) Penyiapan penerapan penegakan peraturan dan penindakan hukum yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian;
- 10) Penyiapan pemeliharaan dokumen akreditasi dan sertifikasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, infraksi (pelanggaran aturan), dan laporan kecelakaan; dan
- 11) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2016 terdiri dari 63 Orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.6
Komposisi Pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

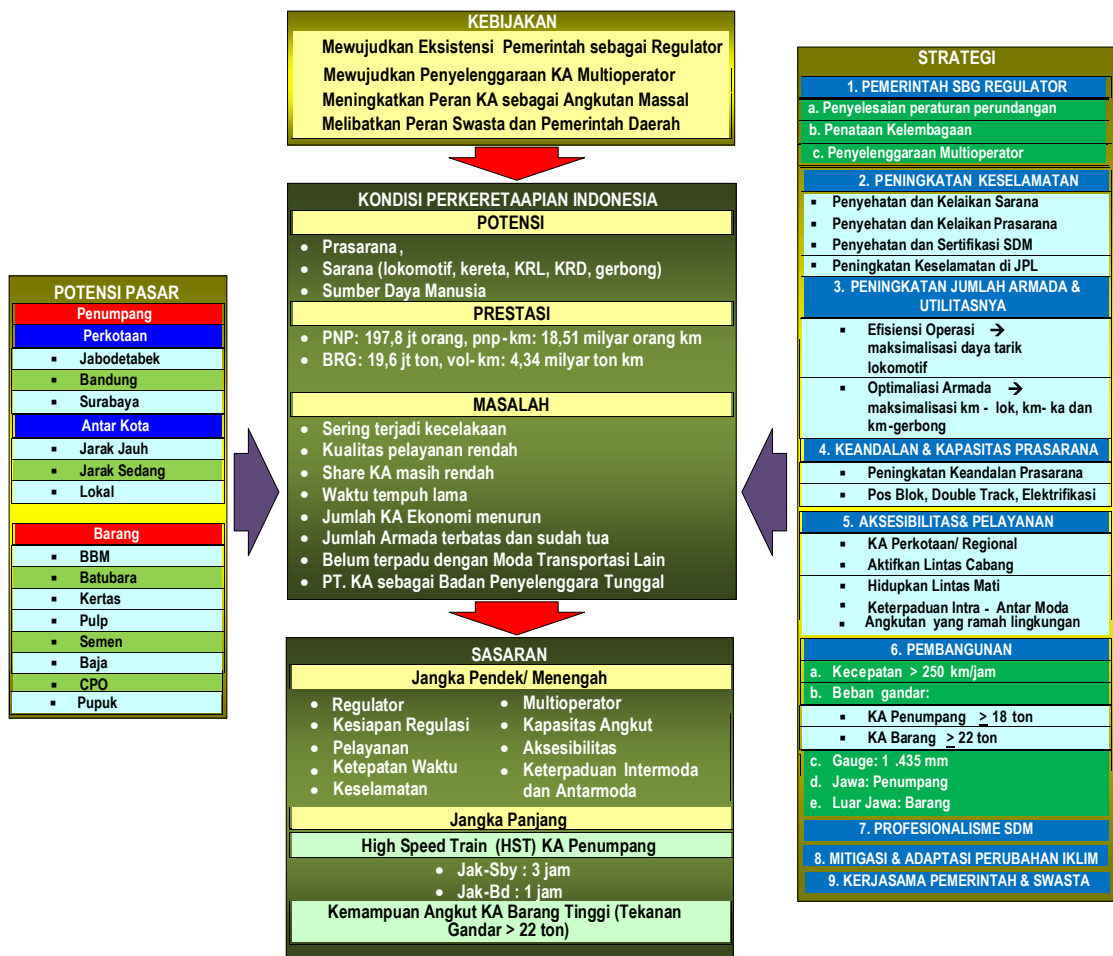
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai 5 Eselon III dan 1 Eselon IV, terdiri :

- 1) Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- 2) Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- 3) Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- 4) Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;
- 5) Subdirektorat Pencegahan & Penegakan Hukum; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

1.5. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

a. *Grand Strategy Organisasi*

Langkah-langkah dalam menghadapi isu strategis dan permasalahan mengikuti alur pikir yang logis dimana tahapan kegiatan yang disusun sesuai dengan jenis, skala, dan urgensi permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu strategi umum (*grand strategy*) yang memayungi kebijakan dan program strategis yang disusun sehingga setiap detail program pembangunan memiliki keterkaitan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam kerangka strategi yang runtut. Diagram alur strategi umum (*grand strategy*) yang disusun untuk pengembangan perkeretaapian nasional di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.7. berikut :



Gambar 1.7

Diagram Alur Grand Strategy Pembangunan perkeretaapian Indonesia

b. Kebijakan Umum

Arah kebijakan pembangunan perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi perkeretaapian untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian melalui penyiapan dan penguatan regulasi dan kelembagaan diantaranya penyelesaian peraturan/pedoman turunan dari UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan standarisasi perkeretaapian nasional secara terpadu;
- 2) Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator diantaranya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta;
- 3) Meningkatkan keselamatan angkutan perkeretaapian melalui pemulihan kondisi keandalan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian (mengurangi backlog perawatan) termasuk pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana serta pelaksanaan penegakan hukum;
- 4) Reaktivasi lintas-lintas potensial yang sudah tidak dioperasikan;
- 5) Meningkatkan kapasitas angkut dan kapasitas lintas terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis yang perlu dikembangkan di wilayah Jawa dan Sumatera;
- 6) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal yang lebih berdaya saing secara antar moda dan intermoda diantaranya melalui pembangunan infrastruktur KA menuju bandara, pelabuhan dan sentra-sentra produksi serta pengembangan KA untuk mendukung angkutan barang/logistik;
- 7) Meningkatkan frekuensi dan pelayanan angkutan KA yang terjangkau dan ramah lingkungan serta sesuai dengan standar pelayanan minimum terutama dalam pengembangan angkutan KA perkotaan/komuter di kota-kota metropolitan guna mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 8) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 9) Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM perkeretaapian baik operator maupun regulator;

- 10) Mengembangkan teknologi perkeretaapian nasional diantaranya dengan pengoptimalan peran industri lokal/dalam negeri di bidang perkeretaapian;
- 11) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendanaan serta penyempurnaan skema pendanaan PSO, IMO dan TAC.
- 12) Melaksanakan perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu, dan berkelanjutan didukung peningkatan dan pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat berbasis Information Technology.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tahun 2016 ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Ditjen Perkeretaapian selama Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2016 yang telah dilakukan reuiu, membandingkan dengan tahun sebelumnya serta target dan realisasi pencapaian dari tahun 2015-2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan unit kerja/instansi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perkeretaapian tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika penyusunan yang mengacu pada pedoman peraturan tersebut diatas ialah sebagai berikut :

- a. **Bab I,** Pendahuluan memuat gambaran singkat mengenai unit kerja Ditjen Perkeretaapian yang termuat dalam kedudukan, tugas dan fungsi sebagai regulator dibidang Perkeretaapian, tugas, fungsi, dan struktur organisasi termasuk visi, misi, sasaran dan tujuan, sumber daya manusia dengan komposisi dan jumlah pegawai dengan penekanan kepada aspek strategis unit organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) pada sajian *grand strategy* organisasi disertai kebijakan umum yang sedang dihadapi organisasi, ditutup dengan sistematika pelaporan.

- b. **Bab II,** Perencanaan Kinerja memuat materi berisikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016 yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) 2016 serta revisi Perjanjian Kinerja (PK) 2016 disusun berdasarkan kelompok Sasaran pada setiap kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai capaian dasar pengukuran kinerja Ditjen Perkeretaapian di tahun 2016.
- c. **Bab III,** Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perkeretaapian memuat materi berisikan metode pengukuran untuk analisis capaian kinerja unit kerja dan realisasi anggaran. Dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis unit kerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2016, Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2015-2019, Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Renstra), Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kontribusi Terhadap Capaian IKU Kementerian Perhubungan termasuk pelaporan realisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2016.
- d. **Bab IV,** Penutup materi berisikan ringkasan LAKIP berupa kesimpulan dan saran-saran yang akan dilakukan unit kerja dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja.
- e. **Lampiran-lampiran,** Terdiri dari Rencana Strategis (RS) 2015 - 2019 Ditjen Perkeretaapian, Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016, revisi Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016, Capaian Pengukuran Kinerja (PKK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

2.1. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015 – 2019 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.004/SK.318/DJKA/12/15 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 Bidang Perkeretaapian.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis tersebut terjadi perubahan target sesuai ketersediaan alokasi pendanaan melalui APBN. Oleh karena itu setiap tahun disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk menyesuaikan target capaian. Rincian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2016
1	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
	Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Jumlah paket kegiatan administrasi, pelaksanaan operasional, monitoring, koordinasi termasuk belanja pegawai	1 tahun
	Tersusunnya laporan survey/studi kebijakan/ masterplan/studi kelayakan bidang pembinaan & peningkatan transportasi perkeretaapian	Jumlah laporan survey/studi kebijakan/ masterplan/studi kelayakan bidang pembinaan & peningkatan perkeretaapian	15 dok
	Terlaksananya kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum, Kepegawaian dan Umum	4 keg
	Terlaksananya Belanja Pegawai termasuk Tunjangan	Pembiayaan Belanja Pegawai termasuk Tunjangan	1 tahun
2	Pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api		

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2016
3	Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1 tahun
	Terlaksananya Angkutan Kereta Api yang bersubsidi	Jumlah Subsidi Angkutan Kereta Api	7 pkt
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA	Jumlah Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA	26 dok
	Terlaksananya Pembinaan bidang LLAKA	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bidang LLAKA	4 keg
	Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api		
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	1 tahun
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Rel/Emplasemen	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Rel/Emplasemen	28,40 km'sp
	Terbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	154,35 km'sp
		Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (penyelesaian)	142,11 km'sp
	Tersedianya material rel	Jumlah km pengadaan rel	1.530 km'sp
	Tersedianya material wesel	Jumlah unit pengadaan wesel	528 unit
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	1 Unit
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	Jumlah Pembangunan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	33 Unit
	Terlaksananya Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional	Jumlah Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional	1 Unit
	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Persinyalan & Telekomunikasi	Jumlah Rehabilitasi / Peningkatan Persinyalan & Telekomunikasi	1 Unit
	Terlaksananya Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi	Jumlah Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi	4 Pkt
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA)	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA)	0 Km'sp
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya)	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya)	1 Unit

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2016
	Terlaksananya Peningkatan/Pembangunan Bangunan Khusus	Jumlah Peningkatan/Pembangunan Bangunan Khusus	9 Unit
	Terlaksananya Pemagaran Fasilitas Pendukung / Sterilisasi	Jumlah Pemagaran Fasilitas Pendukung / Sterilisasi	- Pkt
	Terlaksananya Pengamanan Perlintasan Sebidang	Jumlah Pengamanan Perlintasan Sebidang	3 Unit
	Terlaksananya Pengadaan Lahan	Jumlah Pengadaan Lahan	341.041 M2
	Terlaksananya Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (MTT, dll)	Jumlah Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (MTT, dll)	24 Unit
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana Perkeretaapian	Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana Perkeretaapian	78 Dok
	Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	Jumlah Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	1 Thn
	Terlaksananya Pembinaan bidang Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Pembinaan bidang Prasarana Perkeretaapian	4 Keg
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	1 tahun
4	Pembangunan dan pengelolaan bidang sarana perkeretaapian		
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Teknik Sarana Perkeretaapian	1 tahun
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian	2 Keg
	Terbangunnya sarana KA yang handal	Jumlah lokomotif ekonomi yang dibangun termasuk yang dimodifikasi, KRD, KRL, Railbus, Tram, termasuk kereta kerja	3 Unit
	Terlaksananya Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian (Depo, Balai Yasa, Balai Uji, Peralatan Pengujian)	Jumlah Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian (Depo, Balai Yasa, Balai Uji, Peralatan Pengujian)	3 Paket
	Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Sarana dan Fasilitas Sarana Milik Negara	Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Sarana dan Fasilitas Sarana Milik Negara	3 Paket
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	3 Dok

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2016
	Terlaksananya Pembinaan bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Pembinaan bidang Sarana Perkeretaapian	4 Keg
5	Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan perkeretaapian		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian	3 Keg
	Tersedianya Peralatan Keselamatan SDM Perkeretaapian	Jumlah Peralatan Keselamatan SDM Perkeretaapian	2 Paket
	Tersusunnya laporan survey/Studi Kebijakan/Masterplan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah dokumen survey/studi kebijakan/masterplan bidang keselamatan & teknik sarana	5 Dok
	Terselenggaranya Pembinaan bidang Keselamatan Perkeretaapi	Jumlah Pembinaan bidang Keselamatan Perkeretaapi	6 Keg
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan Perkeretaapian	1 tahun

Pada Rencana Kinerja Tahunan 2016 tersebut di atas masih disajikan dalam bentuk output dan kegiatan berdasarkan kelompok unit kerja, sehingga indikator kinerja yang ditampilkan masih dalam bentuk indikator kinerja kegiatan (IKK).

Keterkaitan antara indikator kinerja kegiatan (output) dengan indikator kinerja utama (outcome) masih perlu dijabarkan lebih lanjut karena untuk menciptakan outcome perlu keterlibatan pihak lain seperti Operator Perkeretaapian dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 bukan hanya merupakan hasil kerja (outcome) Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetapi merupakan hasil kerja (outcome) bersama dengan pihak lain.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan target pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016 yang disusun berdasarkan SP-DIPA Induk Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-022.08-0/2016 tanggal 07 Desember 2015 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015 – 2019 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.004/SK.318/DJKA/12/15 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 Bidang Perkeretaapian.

Rincian target Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2. & Tabel 2.3.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1)	Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional	0,55 Ratio Kecelakaan/ 1 juta km
		2)	Jumlah pedoman standar keselamatan	0 Dokumen
		3)	Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	67 unit
		4)	Tingkat Ketersediaan ATP	0 Unit
		5)	Jumlah Pengamanan/ Penanganan Perlintasan Sebidang	0 Lokasi
		6)	Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	1.525 Sertifikat
2	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	7)	Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian (pelemparan batu)	288 Jumlah Kejadian/Tahun
3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	8)	Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)	0 Dokumen
4	Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance	9)	Jumlah penyederhanaan perijinan Transportasi perkeretaapian	20 Prosentase (%)
		10)	Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	1 Tahun
		11)	Jumlah Penumpang KA PSO	335.129.530 Penumpang
5	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan	12)	Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	0,476 Juta ton CO2e

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
	teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.	13)	Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	0 Lokasi
6	Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional	14)	Terbangunnya jalur kereta api	174,3 Km'sp
		15)	Jumlah sarana kereta api	3 Unit
		16)	Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	1 Proyek
7	Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	17)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis	4 Trayek/Lintas/Rute
		18)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis menjadi komersial	0 Trayek/Lintas/Rute
8	Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel	19)	Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api	5 Lokasi

Telah dilakukan Revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan lingkungan strategis diantaranya Perubahan Alokasi Anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016

Tabel 2.3.
Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	KET
1	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1)	Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional	0,55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km	Tetap
		2)	Jumlah pedoman standar keselamatan	0 dok	Tetap
		3)	Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	1 unit	1 unit di Direktorat Keselamatan
		4)	Tingkat Ketersediaan ATP	0 unit	Tetap
		5)	Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang	3 Lokasi	3 Lokasi di Wilayah BTP Sumbagsel
		6)	Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	4.448 Sertifikat	Terdapat Perubahan

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	KET
2	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	7)	Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian (pelemparan batu)	288 Jumlah Kejadian /Tahun	Tetap
3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	8)	Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)	0 Dokumen	Tetap
4	Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan <i>good governance</i>	9)	Jumlah penyederhanaan perijinan Transportasi perkeretaapian	20 Prosentase (%)	Tetap
		10)	Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	1 Tahun	Tetap
		11)	Jumlah Penumpang KA PSO	335.129.530 Penumpang	Terdapat Perubahan sesuai Kontrak PSO
5	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.	12)	Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	0.476 Juta ton CO2e	Tetap
		13)	Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	0 Lokasi	Tetap
6	Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional	14)	Terbangunnya jalur kereta api	114,59 Km'sp	Terdapat perubahan akibat Perubahan Anggaran
		15)	Jumlah sarana kereta api	3 Unit	Tetap
		16)	Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	1 Proyek	Tetap
7	Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	17)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis	6 Trayek/ Lintas/ Rute	Terdapat Penambahan 2 lintasan rute (wilayah Aceh dan Sumbar)
		18)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis menjadi komersial	0 Trayek/ Lintas/ Rute	Tetap
8	Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel	19)	Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api	5 Lokasi	Tetap

2.3. PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN

Alokasi awal anggaran Ditjen Perkeretaapian TA. 2016 sesuai SP-DIPA Induk Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-022.08-0/2016 tanggal 07 Desember 2015 ialah sebagai berikut :

1. Alokasi dana Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.13.209.109.945.000,-
2. Rincian Pagu APBN Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
 - Belanja Pegawai : Rp.67.946.368.000,- (0,51%)
 - Belanja Barang : Rp.2.099.558.231.000,- (15,89%)
 - Belanja Modal sebesar Rp. 11.041.605.346.000,- (83,59%) dengan rincian :
 - Rupiah Murni : Rp.3.099.795.042.000,- (28,07%)
 - Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp.2.958.810.304.000,- (26,80%)
 - Surat Berharga Syariah Negara : Rp.4.983.000.000.000,- (45,13%)

Telah dilakukan Penghematan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 dimana penghematan untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp.4.745.769.000,- dengan porsi untuk Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp.2.808.404.582.000,- sehingga Alokasi menjadi Rp.10.400.705.363.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi dana Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2016 (APBN-P) sebesar Rp.10.400.705.363.000,-
2. Rincian Pagu APBN Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
 - Belanja Pegawai : Rp.67.946.368.000,- (0,65%)
 - Belanja Barang : Rp.2.027.996.725.000,- (19,50%)
 - Belanja Modal sebesar Rp. 8.304.762.270.000,- (79,85%) dengan rincian :
 - Rupiah Murni : Rp.2.174.542.695.000,- (26,18%)
 - Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp.1.147.219.575.000,- (13,81%)
 - Surat Berharga Syariah Negara : Rp.4.983.000.000.000,- (60,00%)

Setelah dilakukan penghematan oleh Pemerintah, kembali dilakukan *Self Blocking* terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2016 sebesar Rp.765.940.332.000,- sehingga anggaran DIPA tahun 2016 yang dapat diserap menjadi sebesar Rp. 9.634.765.031.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. *Self Blocking* pada Belanja Barang sebesar Rp.536.152.172.000,-
2. *Self Blocking* pada Belanja Modal sebesar Rp.229.788.160.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

A. METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan ini menggunakan formula yang tergantung pada kondisi output dari suatu kegiatan, yaitu :

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan **tidak tercapai sesuai dengan target**, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan **tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran**, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. PENCAPAIAN KINERJA

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.004/SK.318/DJKA/12/15 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 Bidang Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 8 (delapan) sasaran program dengan 17 (tujuh belas) indikator utama, yaitu :

1. Capaian Indikator Kinerja Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api.

Capaian Indikator Kinerja Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api pada tahun 2016 sebesar 156,36%. Pada Tahun 2016 telah terjadi 15 kali kejadian kecelakaan perkeretaapian dengan menggunakan perhitungan Rate of Accident (RoA) yang merupakan Salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut.

$$\text{Rate of Accident} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Target yang ditetapkan tahun 2016 yaitu sebesar 0,55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km dan capaian pada Tahun 2016 sebesar 0,24 Ratio kecelakaan/ 1 juta km atau dengan capaian realisasi sebesar 156,36%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian
Tahun 2016

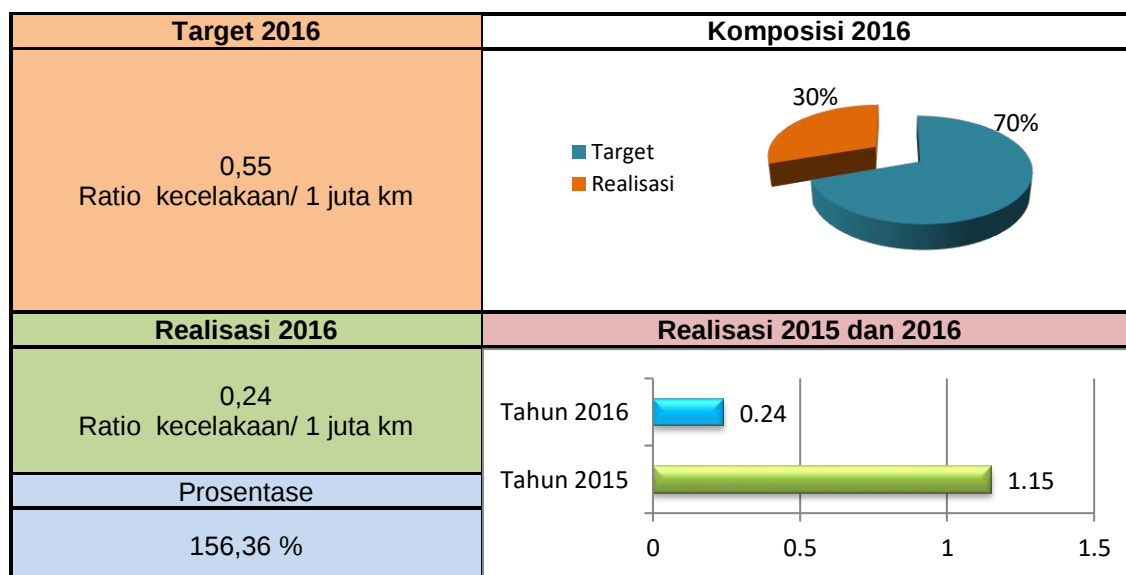
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	Ratio kecelakan / 1 juta km	0,55	0,26	0,26	0,32	0,24	0,24	156,36

IKU 1: Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api

Capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan pada Transportasi Perkeretaapian pada tahun 2015 mencapai (9,09%), hal ini dikarenakan realisasi lebih tinggi 1,15 ratio kecelakaan/ 1 juta km dibanding dengan target yang ditetapkan 0,55 ratio kecelakaan/ 1 juta km, sedangkan pada tahun 2016 melebihi dari target yang ditetapkan, dengan kinerja 156,36%.

Pada tahun 2015 kejadian kecelakaan sebanyak 73 kejadian dengan Km tempuh sebesar 63.710.056 Km sehingga Rasio kejadian kecelakaan sebesar 1,55 ratio kecelakaan/1 juta km

sedangkan pada tahun 2016 jumlah kejadian kecelakaan menurun menjadi 15 kejadian atau menurun sebanyak 386,67% dari tahun 2015 dengan Km tempuh 63.062.950 km, sehingga rasio Kejadian Kecelakaan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,24 ratio kecelakaan/1 juta km.



Gambar 3.1

Capaian Realisasi IKU No.1 Tahun 2016 Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Capaian Indikator Kinerja Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api sebesar 0,24 atau sebesar 156,36% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,55 Ratio Kecelakaan/1 Juta km. Ratio sebesar 0,24 didapatkan dari perhitungan menggunakan formula diatas dimana jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2016 sebanyak 15 kali kejadian dan Km tempuhnya sebesar 63.062.950 Km. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung juga adanya pelaksanaan kegiatan yang menunjang keselamatan transportasi perkeretaapian antara lain :

- 1) Audit Keselamatan Perkeretaapian dan Safety Assessment;
- 2) Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian;
- 3) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api;
- 4) Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian;
- 5) Sertifikasi, pemeliharaan sertifikat dan ISO Manajemen Mutu Audit dan Inspeksi Keselamatan;

- 6) *In House Training* Bidang Rekayasa Struktur Jalan Rel dan Jembatan;
- 7) Peningkatan kualitas PPNS Perkeretaapian;
- 8) Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan;
- 9) Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Perkeretaapian;
- 10) Rakor Keselamatan Perkeretaapian;
- 11) Workshop Preventif Kecelakaan di Bidang Perkeretaapian;
- 12) Evaluasi Bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- 13) Pemeriksaan Peralatan Penangan Kecelakaan Kereta Api;
- 14) Bimbingan Teknis Analisis Kecelakaan Kereta Api;
- 15) Bimbingan Teknis Penanganan Kecelakaan Kereta Api;
- 16) Program Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kemanan Perkeretaapian;
- 17) Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Audit dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian;
- 18) Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prasarana, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- 19) Evaluasi Kinerja PPNS Perkeretaapian;
- 20) P4GN Pada Transportasi Kereta Api;
- 21) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keselamatan Perkeretaapian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 117,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13.604.532.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp.2.379.939.352,- dari realisasi sebesar Rp. 11.224.592.648,-

Tabel 3.2
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Tar-get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-angan (%)	Fisik (%)	Efisi-ensi (%)
Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	0,55	13,604	11,224	2,379	82,51	156,36	100

2. Indikator Kinerja Jumlah pedoman standar keselamatan

Pada Tahun 2016, Tidak terdapat target maupun realisasi untuk Indikator Kinerja Jumlah pedoman standar keselamatan, hal ini dikarenakan Pedoman Standar Keselamatan Perkeretaapian telah diterbitkan pada tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman dan Tata Cara Audit Keselamatan Perkeretaapian, sehingga target terhadap penyusunan pedoman standar keselamatan sesuai renstra sebanyak 2 buah **telah terpenuhi** pada tahun 2015. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.3.

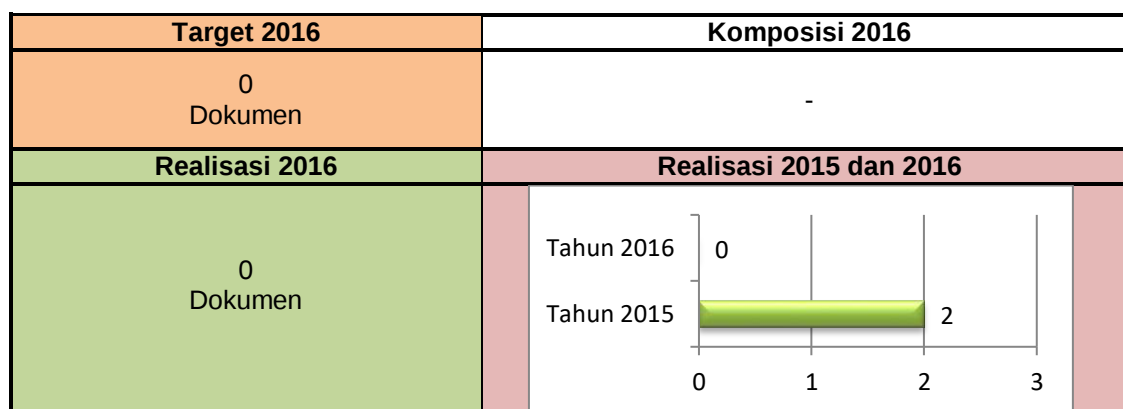
Tabel 3.3

Capaian Kinerja Jumlah pedoman standar keselamatan Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah pedoman standar keselamatan	%	0	-	-	-	-	-	-

Untuk tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian melakukan kegiatan Penyusunan PM Pedoman dan Tata Cara Audit Keselamatan Perkeretaapian. Peraturan Menteri yang mengatur Tata Cara Audit Keselamatan Perkeretaapian tersebut disusun dan selesai pada Triwulan ke-III atau pada bulan September tahun 2015.

IKU 2: Jumlah pedoman standar keselamatan



Gambar 3.2

Capaian Realisasi IKU No.2 Tahun 2016 Jumlah pedoman standar keselamatan

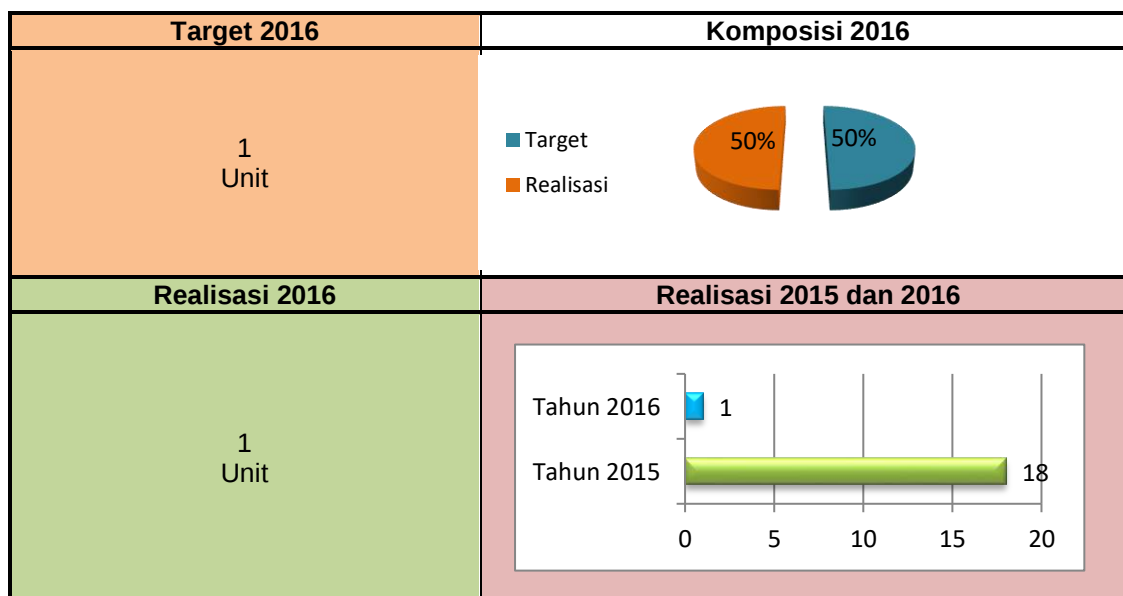
3. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian pada tahun 2016 sebesar 100%. Pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan pengadaan gerbong pendukung peralatan berat untuk mengangkat dan menggeser beban akibat kecelakaan Kereta Api sebanyak 1 unit dan telah selesai dilaksanakan ditahun 2016. Realisasi per-triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	Unit	1	0	0	0	1	1	100

IKU 3 : Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian



Gambar 3.3
Capaian Realisasi IKU No.3 Tahun 2016 Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian, khususnya pada indikator Capaian Kinerja Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian, pada tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pengadaan gerbong pendukung peralatan berat untuk mengangkat dan menggeser beban akibat kecelakaan Kereta Api sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan jumlah target yang dibuat. Pengadaan tersebut bertujuan untuk optimalisasi proses pelaksanaan penanganan kecelakaan kereta api sehingga kerugian yang ditimbulkan dari akibat kecelakaan kereta api dapat diminimalisir.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 101,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 39.600.000.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp. 460.678.313,- dari realisasi sebesar Rp. 39.139.321.687,-.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Tar-get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-angan (%)	Fisik (%)	Efisi-ensi (%)
Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	1	39,6	39,139	0,460	98,84	100	101,16

4. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan ATP

Capaian Indikator Tingkat Ketersediaan ATP Tahun 2016 sebesar 0 unit atau tidak ada pengadaan dan pemasangan ATP pada Tahun 2016. Pada Tahun 2015 Tingkat Ketersediaan ATP sebanyak 3 unit yang terpasang di antara lain :

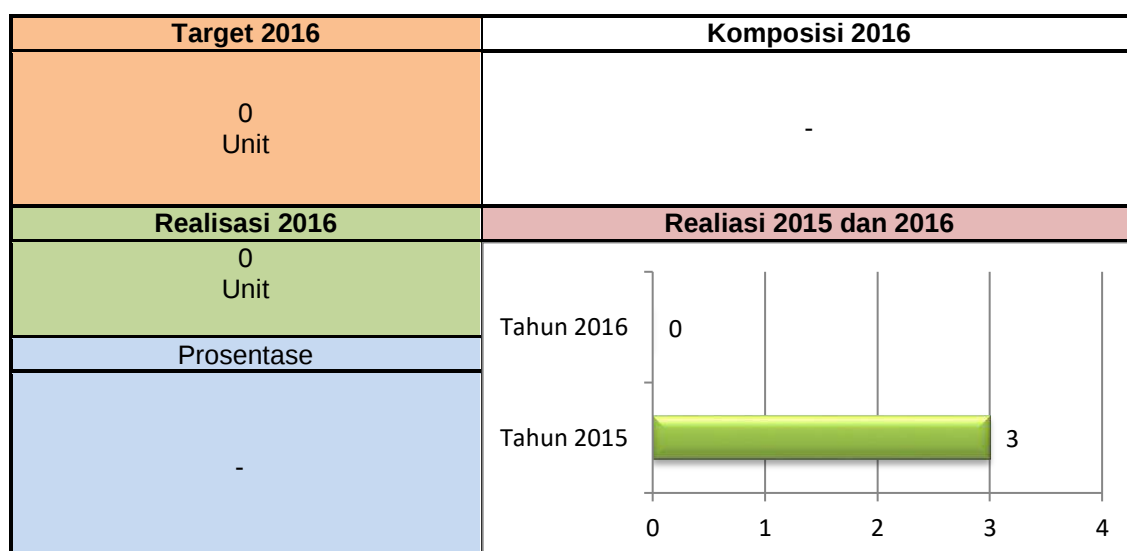
- a. Pembangunan *Automatic Train Protection* (ATP) dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Barat di lintas Cikampek - Brebes;
- b. Pembangunan *Automatic Train Protection* (ATP) dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Tengah di lintas Tegal - Bojonegoro;

- c. Pembangunan *Automatic Train Protection* (ATP) dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Timur di lintas Kapas - Surabaya Pasar Turi.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tingkat Ketersediaan ATP Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Tingkat Ketersediaan ATP	Unit	0	0	0	0	0	0	-

IKU 4: Tingkat Ketersediaan ATP



Gambar 3.4
Capaian Realisasi IKU No.4 Tahun 2016 Tingkat Ketersediaan ATP

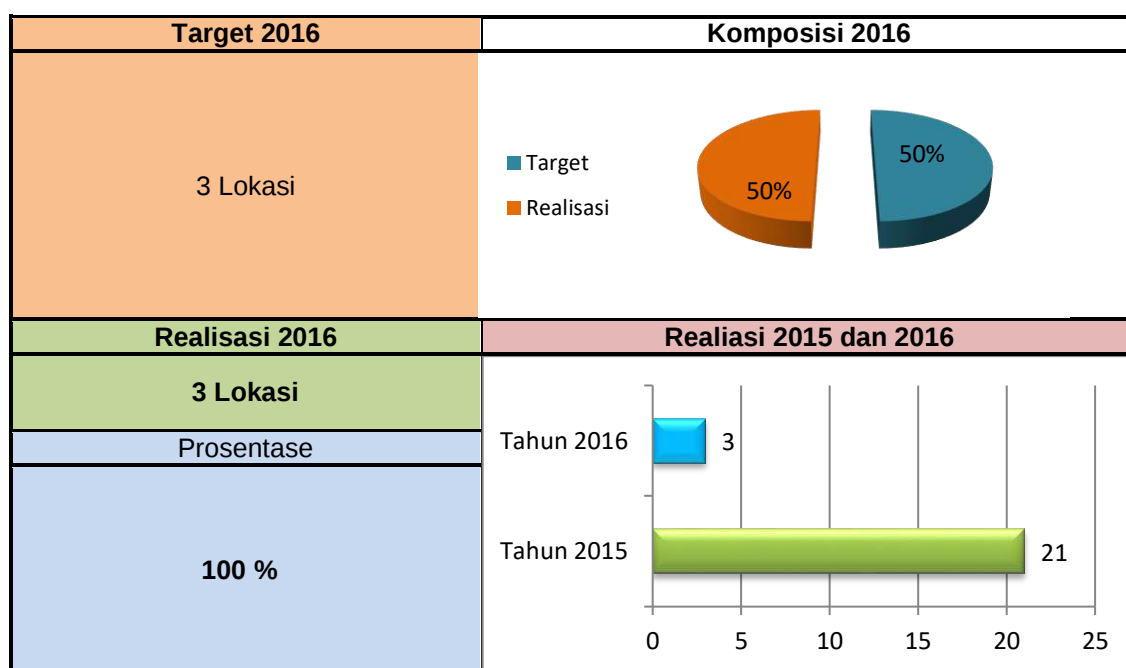
5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang

Capaian Indikator kinerja Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang Tahun 2016 sebesar 100%. Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang di 3 (tiga) lokasi di wilayah Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mengamankan operasi kereta api dari kecelakaan dengan lalu lintas angkutan jalan raya. Realisasi kumulatif per-triwulan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang	Lokasi	3	0	0	0	3	3	100

IKU 5: Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang



Gambar 3.5

Capaian Realisasi IKU No.5 Tahun 2016 Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian khususnya pada indikator Capaian Kinerja Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang, pada tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan pintu perlindungan pada 3 (tiga) lokasi perlindungan sebidang di wilayah Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- JPL. 76 KM. 330+450 antara Prabumulih – Lembak;
- JPL. 02 KM. 000+645 antara Muara Enim – Tanjung Enim;
- JPL. 127 KM. 397+292 antara Muara Enim – Banjarsari.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 106,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.010.000.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp.332.100.000,- dari realisasi sebesar Rp.4.677.900.000,-

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Efisiensi (%)
Jumlah Pengamanan/ Penanganan Perlintasan Sebidang	3	5,010	4,677	0,322	93,37	100	106,63

6. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian pada tahun 2016 sebanyak 3213 atau sebesar 72,23% dari target yang ditetapkan sebesar 4.448 sertifikat. Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian pada Indikator Kinerja Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian, pada tabel 3.9 jumlah Sertifikat Kecakapan SDM Perkeretaapian yang dilaksanakan tahun 2016 antara lain :

- a. Tenaga Penguji Prasarana yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sertifikat;
- b. Tenaga Penguji Sarana yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat;
- c. Inspektur Prasarana yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 31 (tiga puluh satu) sertifikat;
- d. Inspektur Sarana yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat;
- e. Auditor Perkeretaapian yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 6 (enam) sertifikat;
- f. Penguji Awak Sarana Perkeretaapian yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 9 (sembilan) sertifikat;

- g. Awak Sarana Perkeretaapian yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 1128 (seribu seratus dua puluh delapan) sertifikat;
- h. Petugas PPKA yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) sertifikat;
- i. Penjaga Perlintasan (JPL) yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sertifikat;
- j. Tenaga Pemeriksa dan Perawatan Prasarana yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 1092 (Seribu Sembilan Puluh Dua) sertifikat;
- k. Train Watcher yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkeretaapian sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) sertifikat.

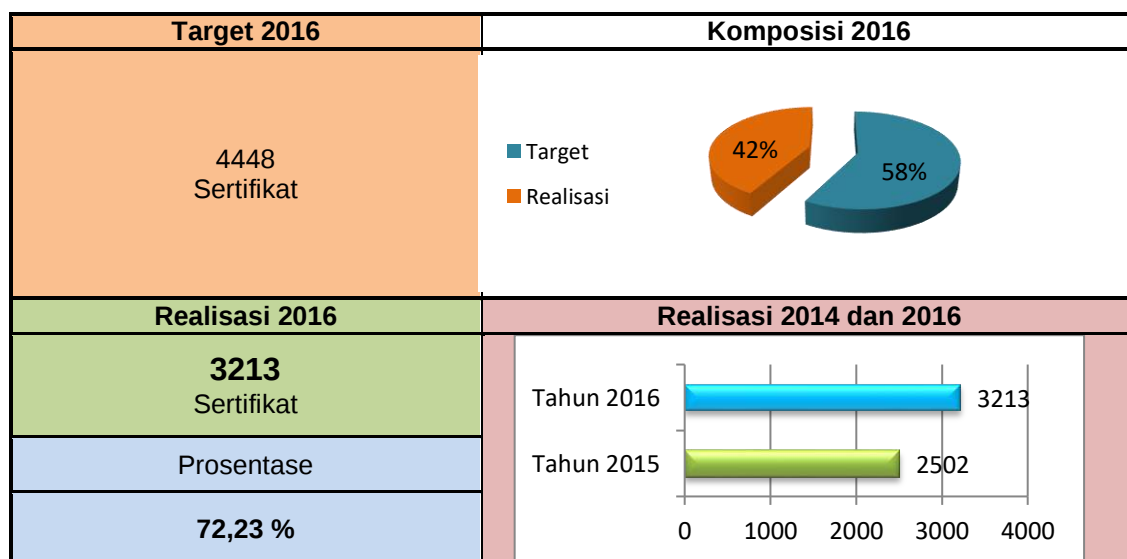
Realisasi komulatif per-triwulan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.9

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	Sertifikat	4448	776	1120	1930	3213	3213	72,23

IKU 6 : Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian



Gambar 3.6

Capaian Realisasi IKU No.6 Tahun 2016 Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian

Analisis Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan capaian target tidak terpenuhi yaitu sebagai berikut :

- a) Keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi;
- b) Masih minimnya jumlah Assesor pengujian yang saat ini hanya 15 Assesor sehingga tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam satu tahun.

Alternatif Perbaikan Untuk Masa Depan

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yaitu perlu dilakukan penambahan jumlah Assesor pengujian sehingga dapat dilaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi dengan peserta Uji lebih banyak dan waktu pelaksanaan yang bisa lebih optimal.

7. Capaian Indikator Kinerja Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)

Capaian indikator kinerja Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu) mencapai 188,19% dari target yang ditetapkan sebesar 288 kejadian. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana berikut

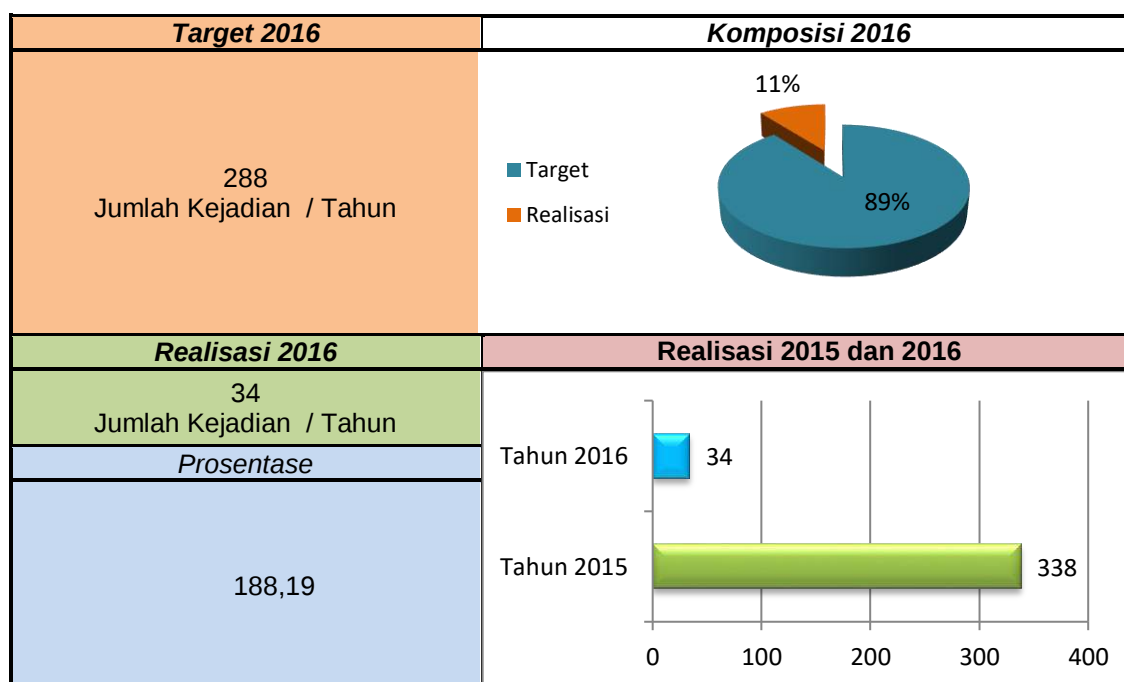
Tabel 3.10

Capaian Kinerja Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu) 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)	Jumlah Kejadian / Tahun	288	9	12	17	34	34	188,19

Pencapaian triwulan di tahun 2016 tersebut terlihat lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan, artinya kejadian pelemparan batu pada sarana KA yang beroperasi atau yang sedang melintas telah menurun.

IKU 7 : Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)



Gambar 3.7

Capaian Realisasi IKU No.7 Tahun 2016 Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pada indikator Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu), didukung adanya pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Penyidikan dan Evaluasi Tindak Pidana Perkeretaapian;
- Penyuluhan Regulasi Pidana Perkeretaapian dan Sosialisasi Tata Cara Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang;
- Identifikasi/ Pendataan dan Peningkatan Keselamatan di Daerah Rawan Pengrusakan dan Pencurian di Jalur Kereta Api;
- Penegakan Hukum dan Korwas PPNS di Bidang Perkeretaapian;
- Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api.

8. Capaian Indikator Kinerja Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)

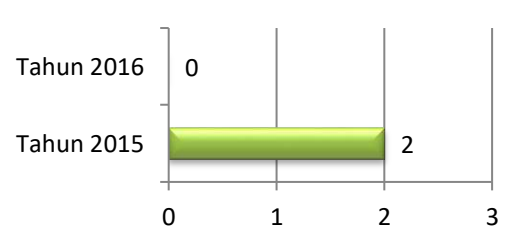
Pada Tahun 2016, Tidak terdapat target maupun realisasi untuk Indikator Kinerja Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi). Hal ini disebabkan karena penyempurnaan/revisi telah dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 2 Dokumen. Realisasi kumulatif per-triwulan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.11

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	-

IKU 8 : Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)

Target 2016	Komposisi 2016
0 Dokumen	-
Realisasi 2016	Realisasi 2015 dan 2016
0 Dokumen	 Tahun 2016 0 Tahun 2015 2
Prosentase	
-	

Gambar 3.8

Capaian Realisasi IKU No.8 Tahun 2016 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian

Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan target yang tercantum dalam renstra Kementerian Perhubungan 2016-2019 dimana sampai dengan Tahun 2019 jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) sebanyak 2 dokumen dan telah terpenuhi pada tahun 2015 yaitu Rancangan Peraturan Menteri di Bidang Lalu Lintas Kereta Api dan Rancangan Peraturan Menteri Formulasi Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) dengan Metode Tarif.

9. Capaian Indikator Kinerja Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Capaian Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016 mencapai 100%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Prosentase (%)	20	0	0	0	20	20	100

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan *good governance* khususnya pada indikator Capaian Kinerja Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016, pada tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian melakukan penyederhanaan perizinan antara lain :

- a. Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum:
 - 1) Penetapan Trase Jalur KA;
 - 2) Penetapan Badan Usaha;
 - 3) Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
 - 4) Izin Usaha;
 - 5) Izin Pembangunan;
 - 6) Izin Operasi.

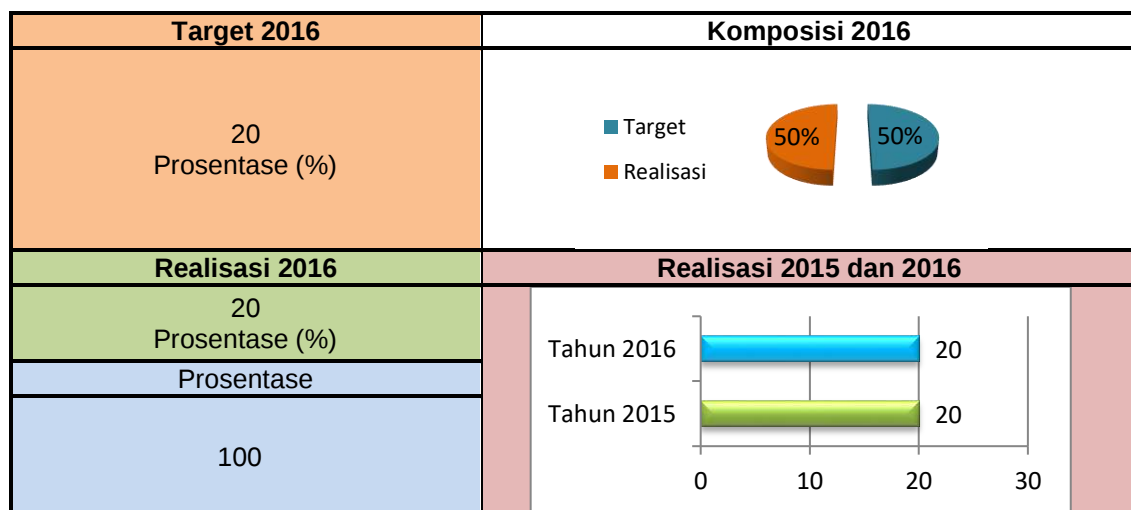
b. Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum :

- 1) Izin Usaha;
- 2) Izin Operasi.

c. Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus :

- 1) Persetujuan Prinsip Pembangunan;
- 2) Penetapan Trase Jalur KA;
- 3) Izin Pembangunan;
- 4) Izin Operasi.

IKU 9 : Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian



Gambar 3.9

Capaian Realisasi IKU No.9 Tahun 2016 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan *good governance*, pada tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian melakukan revisi beberapa Peraturan Menteri Perhubungan khususnya mengenai waktu pelaksanaan Perizinan di bidang perkeretaapian. hal ini dilakukan dalam rangka mempersingkat waktu perizinan dan prosedur tahapan perizinan menjadi lebih pendek. selain hal tersebut, dalam pelaksanaannya telah dikoordinasikan dan di bahas bersama direktorat teknis terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan di tingkat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran tidak terdapat alokasi anggaran dimana output dokumen telah terpenuhi.

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.9

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Efisiensi (%)
Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	20	-	-	-	-	100	-

10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) Tahun 2016 mencapai 100%. Analisis capaian disebutkan pada Tabel 3.14, termasuk digambarkan grafik realisasi kumulatif triwulan dibandingkan target tahunan.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	Tahun	1	0	0	0	1	1	100

Pada tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian Melaksanakan Kegiatan pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) yang meliputi antara lain:

- a. Perawatan Jalur Kereta Api, terdiri dari :
 - 1) Perawatan rel;

- 2) Perawatan bantalan;
 - 3) Perawatan balas;
 - 4) Perawatan wesel;
 - 5) Perlintasan sebidang.
- b. Perawatan Jembatan, terdiri dari :
- 1) Perawatan jembatan;
 - 2) Perawatan terowongan;
- c. Perawatan Stasiun Kereta Api;
- d. Perawatan Fasilitas Operasi Kereta Api, terdiri dari :
- 1) Perawatan seluruh peralatan sinyal dan telekomunikasi;
 - 2) Perawatan instalasi listrik meliputi seluruh perawatan Listrik Aliran Atas dan Listrik Umum untuk fasilitas pengoperasian prasarana perkeretaapian.
 - 3) Pelaksanaan pengopeprasian prasarana perkeretaapian milik negara yaitu oleh petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memenuhi persyaratan kualifikasi kecakapan, yang meliputi :
 - Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta-api;
 - Pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas;
 - Pengaturan langsiran;
 - Pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan pintu perlintasan resmi dijaga;
 - Pelumasan wesel dan pintu perlintasan;
 - Pekerjaan K3 (Kebersihan, Keindahan, Keamanan).

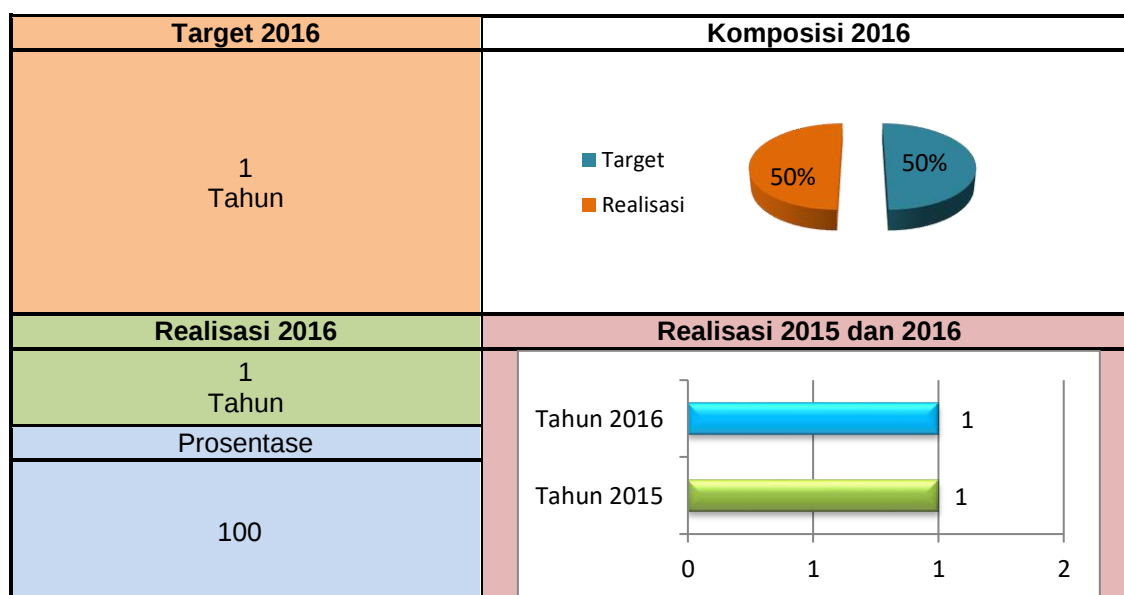
Lokasi Kegiatan IMO dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15
Lokasi Kegiatan IMO Tahun 2016

No	URAIAN	KETERANGAN
1.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah DKI Jakarta dan Banten	Lintas jalur Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP I DKI Jakarta dan Banten
2.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat	Lintas jalur Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP II dan III Jawa Bagian Barat

No	URAIAN	KETERANGAN
3.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah	Lintas jalur Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV, V dan VI Jawa Bagian Tengah
4.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur	Lintas jalur Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII, VIII dan IX Jawa Bagian Timur
5.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara	Lintas jalur Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Bagian Utara
6.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat	Lintas jalur Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Bagian Barat
7.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Lintas jalur Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Bagian Selatan

IKU 10: Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)



Gambar 3.10

Capaian Realisasi IKU No.10 Tahun 2016 Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) tahun 2016 berdasarkan kontrak antara Ditjen Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : 01/KTR/PPFPP-KA/I/2016 dan HK.221/I/28/KA-

2016 tanggal 18 Januari 2016 dan Addendum Kontrak Nomor I Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Nomor : 11/KTR/PPFPP-KA/X/2016 – KL.701/X/14/KA-2016 tanggal 12 Oktober 2016.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) sesuai dengan KP 27 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2016. Dalam setiap pelaksanaan pembayaran perawatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan verifikasi dengan hasil realisasi pelaksanaan IMO, dengan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Verifikasi sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ditjen Perkeretaapian Nomor : KP.801/SK.115/DJKA/4/16 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Teknis Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) TA 2016 tanggal 20 April 2016.
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP.801/SK.16/DJKA/8/16 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP.801/SK.115/DJKA/4/16 tanggal 20 April 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Teknis Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Verifikasi dilakukan setiap bulan atau sesuai kebutuhan sebagai dasar pembayaran Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO).

Dari nilai kontrak yang disepakati alokasi anggaran untuk kegiatan Perawatan terdiri dari 2 (Dua) Daerah Operasi (DAOP) yaitu :

- a. DAOP 1 Jakarta;
Daerah Operasi (DAOP) 1 Jakarta melakukan Perawatan Listrik Aliran Atas
- b. DAOP 8 Surabaya,
Daerah Operasi (DAOP) 8 Surabaya melakukan Perawatan Jalan Rel dan Jembatan

Untuk Biaya Pegawai Perawatan dan Pengoperasian Prasarana yaitu sebagai berikut :

- a. DAOP 1 Jakarta;
- b. DAOP 2 Bandung;
- c. DAOP 3 Cirebon;

- d. DAOP 4 Semarang;
- e. DAOP 5 Purwokerto;
- f. DAOP 6 Yogyakarta;
- g. DAOP 7 Madiun;
- h. DAOP 8 Surabaya;
- i. DAOP 9 Jember;
- j. Divre I Sumatera Utara;
- k. Divre II Sumatera Barat;
- l. Divre III Kertapati Sumatera Selatan;
- m. Divre IV Tanjung Karang;
- n. Kantor Pusat.

Dalam monitoring pelaksanaan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) di wilayah Jawa dan Sumatera, Balai Teknik Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai perwakilan dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian ikut membantu verifikasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Balai Teknik Perkeretaapian/Satuan Kerja.

Pembagian wilayah monitoring berdasarkan Balai Teknik Perkeretaapian sebagai berikut :

- a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten
 - ✓ DAOP 1 Jakarta
- b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat
 - ✓ DAOP 2 Bandung, DAOP 3 Cirebon dan Kantor Pusat PT. KAI Bandung.
- c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah
 - ✓ DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto dan DAOP 6 Yogyakarta
- d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur
 - ✓ DAOP 7 Madiun, DAOP 8 Surabaya dan DAOP 9 Jember
- e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara;
 - ✓ Divre I Sumatera Utara
- f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat;
 - ✓ Divre II Sumatera Barat
- g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
 - ✓ Divre III Palembang dan Divre IV Tanjung Karang

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.142.816.666.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Realisasi sebesar Rp. 1.142.816.666.000,-

Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan penghematan dan berdampak penghematan kepada Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) dengan penghematan sebesar **Rp. 507.183.334.000,-** (*Lima Ratus Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.9

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Efisiensi (%)
Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	1	1.142	1.142	0	100	100	100

Berdasarkan dari Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tersebut dilakukan penandatanganan Kontrak Addendum Nomor I dengan Nomor : 11/KTR/PPFPP-KA/X/2016, KL.701/X/14/KA-2016 tanggal 12 Oktober 2016 nilai kontrak semula sebesar **Rp.1.650.000.000.000,-** (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*) menjadi **Rp.1.142.816.666.000,-** (*Satu Triliun Seratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*). Pada tanggal 8 Desember 2016, kembali dilakukan penandatanganan Addendum Kontrak Nomor II Nomor: 12/KTR/PPFPP-KA/XII/2016, KL.701/XII/12/KA-2016, perubahan tersebut tidak mengubah nilai kontrak.

11. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang KA *Public Service Obligation* (PSO)

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2016 mencapai 98,15%. Analisis capaian dan Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana pada Tabel 3.17.

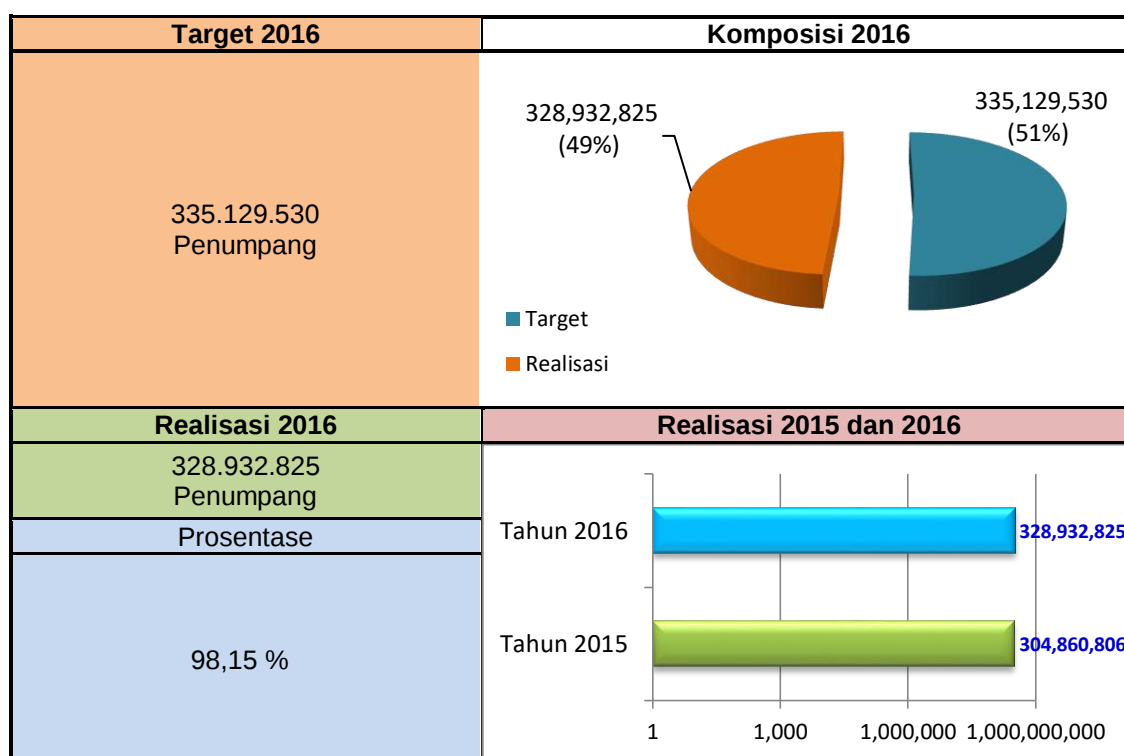
Tabel 3.17
Capaian Kinerja Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Sat.	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah Penumpang KA PSO	Pnp	335.129.530	78.293.911	161.399.893	242.368.746	322.031.775	328.932.825	98,15

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan *good governance* khususnya pada indikator Jumlah Penumpang KA PSO, periode tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melaksanakan kontrak PSO (*Public Service Obligation*) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai Kontrak bersama Nomor: PL 102/A.682/DJKA/12/15 dan Nomor: HK.221/XII/53/KA.2015 pada tanggal 22 Desember 2015 dengan nilai kontrak PSO (*Public Service Obligation*) bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.827.380.508.000

Pelaksanaan PSO tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 153 ayat (1) “Untuk pelayanan kereta api kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan kereta ekonomi ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lebih rendah dari pada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik”.

IKU 11 : Jumlah Penumpang KA PSO



Gambar 3.11
Capaian Realisasi IKU No.11 Tahun 2016 Jumlah penumpang KA PSO

Analisis Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan capaian target tidak tercapai yaitu sebagai berikut :

- Perubahan frekuensi KA akibat adanya bencana alam.
- Ketidaksesuaian jumlah Stamformasi realisasi dibandingkan dengan Stamformasi kontrak atau Stamformasi realisasi biasanya lebih rendah dibandingkan dengan Stamformasi kontrak.
- Beberapa realisasi stamformasi Kereta yang berbeda dengan perhitungan karena ketersediaan sarana yang terbatas akibat adanya perawatan.
- Naik turunnya minat masyarakat terutama pada KRL Jabodetabek misalnya akibat adanya gangguan ataupun antrian kereta (Trend Penumpang).

Alternatif Perbaikan Untuk Masa Depan

Upaya perbaikan ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :

- a) Perhitungan kembali secara detail target kinerja dalam kontrak sehingga kontrak kinerja angkutan bisa lebih realistis.
- b) Meningkatkan jumlah sarana yang akan digunakan sebagai cadangan pada saat adanya perawatan sehingga tidak menyebabkan perubahan stamformasi kereta yang dijalankan.
- c) Pembangunan Jalur ganda yang dimaksudkan dapat memisahkan antara jalur KA Jarak jauh dengan KRL Jabodetabek sehingga mengurangi antrian kereta yang dapat menyebabkan keterlambatan.

12. Capaian Indikator Kinerja Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan

Capaian Indikator Kinerja Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan Tahun 2016 mencapai 702,31% dari target yang ditetapkan sebesar 0,476 Juta ton CO₂e. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.18

Tabel 3.18

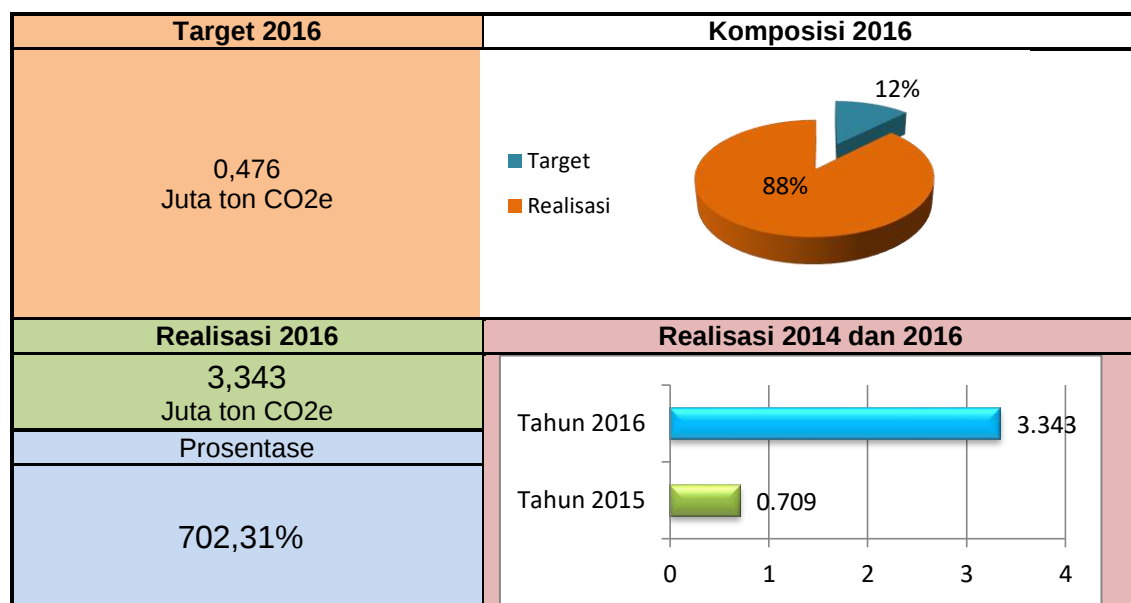
Capaian Kinerja Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	Juta ton CO ₂ e	0,476	0,839	1,694	2,687	3,343	3,343	702,31 %

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi perkeretaapian khususnya pada indikator Capaian Kinerja Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor

transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan Tahun 2016, dilihat dari grafik tersebut diatas menunjukkan capaian pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Dijelaskan bahwa pencapaian yang melebihi target ini menunjukkan sumbangsih dari subsektor perkeretaapian mencapai 5,008 Juta ton CO₂e artinya lebih banyak dari sebagaimana target yang ditetapkan.

IKU 12 : Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan



Gambar 3.12

Capaian Realisasi IKU No.12 Tahun 2016 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan

Metode perhitungan yang dilakukan untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sub sektor Kereta Api dengan perhitungan yakni sebagai berikut :

a. Rumus

$$\Delta E = E_{KBM} - E_{KA}$$

dimana, ΔE = Indikasi pengurangan emisi kendaraan bermotor oleh KA (kg/thn)

E_{KBM} = Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA (kg/thn)

E_{KA} = Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn)

$$K_{BBM} = l_{BBM} \times p \times q$$

dimana, K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

ℓ_{BBM} = Konsumsi bahan bakar spesifik (ltr/km/pnp)

p = Panjang rata-rata perjalanan (km)

q = Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute tersebut (org/thn)

$$E_{CO_2} = K_{BBM} \times e_{CO_2}$$

dimana, E_{CO_2} = Jumlah emisi CO₂ (kg/thn)

K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

e_{CO_2} = Tingkat emisi bahan bakar (kg/ltr)

b. Koefisien

- Tingkat emisi bahan bakar (Sumber: Studi Kebutuhan Energi Sub Sektor Perkeretaapian, 2009)

e_{CO_2} Solar = 2,6664 kg/ltr

e_{CO_2} Premium = 2,2606 kg/ltr

e_{CO_2} BBG = 1,4659 kg/ltr

- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan penumpang (Sumber: Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS,2010)

$\ell_{BBM KA}$ = 0,002 ltr/pnp/km

$\ell_{BBM BUS}$ = 0,0125 ltr/pnp/km

$\ell_{BBM Mobil}$ = 0,020 ltr/pnp/km

$\ell_{BBM Spd Mtr}$ = 0,025 ltr/pnp/km

- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan barang (Sumber: Studi Pengembangan Transportasi KA yang efisien dan ramah lingkungan,2010)

$\ell_{BBM KA}$ = 0,00032 ltr/ton/km

$\ell_{BBM TRUCK}$ = 0,018 ltr/ton/km

c. Asumsi

- 1) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) dihitung dengan mengalikan prediksi jumlah penumpang tahunan dengan *load factor* sebesar 0,7. *Load factor* sebesar 0,7 diperoleh dari Studi Perhitungan Load Factor Kereta Api Ekonomi Nasional (2009) yang menggambarkan tingkat okupansi penumpang sebesar 70%;

- 2) Panjang rata-rata perjalanan (p) diperoleh dengan mengalikan panjang lintasan dengan 0,5. Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut;
- 3) Proporsi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4.

Metode tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Perhitungan yang dilakukan dalam menganalisa penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor KA didapat capaian data sebagai berikut :

- a. Jumlah penumpang yang melewati rute (q) rata-rata sampai dengan akhir tahun 2016 didapat sebanyak 320.169.000 penumpang (Penumpang Jawa : 59.060.000, Penumpang Sumatera : 5.361.000 & Penumpang Jabodetabek : 255.748.000);
- b. Panjang rata-rata perjalanan (p) yang di capai pada tahun 2016 diperoleh dari Panjang Lintasan yang beroperasi x 0,5, Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut
- c. Proporsi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4 (sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dijelaskan pada asumsi tersebut diatas;
- d. Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan yang signifikan antara Tahun 2015 sebesar 0,709 Juta ton CO₂e sedangkan pada tahun 2016 sebesar 5,008 Juta ton CO₂e atau selisih sebesar 606,35%, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan panjang rata-rata yang digunakan pada tahun 2015 dengan 2016 sebagai berikut :
 - Pada tahun 2015 : Panjang Lintasan x 0,5, Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut. Panjang Lintasan diasumsikan panjang jalur yang terbangun di tahun 2015 sepanjang 179.33 Km.
 - Pada Tahun 2016 : Panjang Lintasan x 0,5, Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut. Panjang Lintasan diasumsikan panjang lintasan yang beroperasi dimana dibagi menjadi 3 Wilayah yaitu Pulau Jawa sepanjang : 3.150 Km, Pulau Sumatera : 868 Km dan Jabodetabek : 170 km.

13. Capaian Indikator Kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Target Indikator Kinerja Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi perkeretaapian khususnya indikator kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan, untuk target dan capaian di tahun 2016 tidak ditargetkan dan tidak terdapat kegiatan untuk prasarana perkeretaapian dengan menerapkan konsep ramah lingkungan. Hal ini sesuai pada dokumen Renstra bidang Perkeretaapian tahun 2016-2019 dimana target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 lokasi dan telah dilaksanakan pada tahun 2015 sebanyak 1 lokasi.

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0

14. Capaian Indikator Kinerja Terbangunnya jalur kereta api

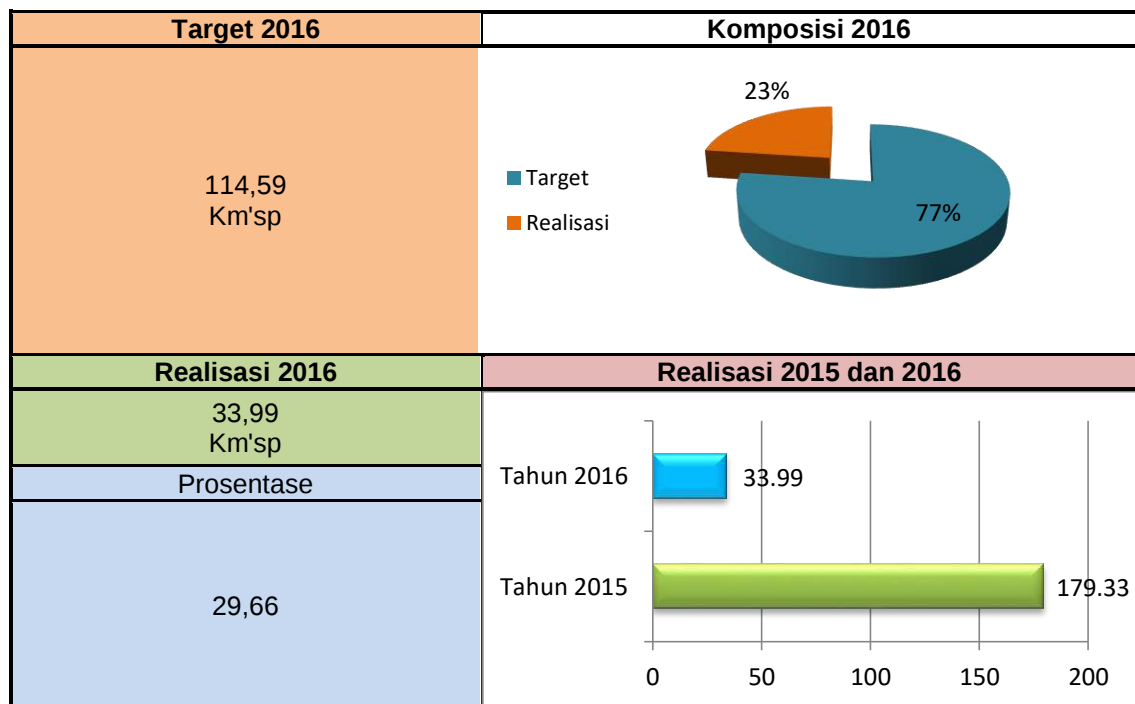
Capaian Indikator Kinerja Terbangunnya jalur kereta api sebesar 29,66% dan belum memenuhi sebagaimana target yang ditetapkan sepanjang 114,59 Km'sp. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.20

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Terbangunnya jalur kereta api Tahun 2016 terhadap Target pada Reviu Perjanjian Kinerja 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Terbangunnya jalur kereta api	Km'sp	114,59	0	0	0	33,99	33,99	29,66

IKU 14: Terbangunnya jalur kereta api



Gambar 3.13
Capaian Realisasi IKU No.14 Tahun 2016
Terbangunnya jalur Kereta Api milik negara (IMO)

Rincian kegiatan pembangunan jalur perkeretaapian pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Target Pembangunan Jalur KA sepanjang 114,59 km

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Pembangunan Jalan KA di Km. 0 + 000 s/d Km. 9+ 700 (Sumbagut)	9.50	Km'sp
2	Pembangunan Jalan KA di Km. 9 + 700 s/d Km. 19+ 200 (Sumbagut)	9.50	Km'sp
3	Pembangunan Jalan KA di Km. 19 + 200 s/d Km. 28+ 900 (Sumbagut)	9.60	Km'sp
4	Pembangunan Jalan KA di Km. 28 + 900 s/d Km. 38 + 500 sepanjang 9.600 m'sp (Sumbagut)	9.60	Km'sp
5	Pembangunan Jalan KA di Km. 38 + 500 s/d Km. 48 + 100 sepanjang 9.600 m'sp (Sumbagut)	9.60	Km'sp
6	Pembangunan Jalan KA di Km. 48 + 100 s/d Km. 57 + 800 sepanjang 9.700 m'sp (Sumbagut)	9.70	Km'sp
7	Pembangunan Jalan KA di Km. 236 + 000 s/d Km. 237 + 000 sepanjang 3.000 m'sp empl Dumai	3.00	Km'sp
8	Pembangunan Jalan KA di Km. 227 + 000 s/d Km. 236 + 000 sepanjang 9.000 m'sp	9.00	Km'sp

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
9	Pembangunan Jalan KA di Km. 218 + 000 s/d Km. 227 + 000 sepanjang 9.000 m'sp	9.00	Km'sp
10	Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) di Km.66+925-Km.68+425 antara Maja - Rangkasbitung Sepanjang 1,50 Km'sp	1.50	Km'sp
11	Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) di Km.68+425-Km.69+925 antara Maja - Rangkasbitung Sepanjang 1,50 Km'sp	1.50	Km'sp
12	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 256+250 s.d Km. 252+300 sepanjang 3900 M'sp antara Palur – Kemiri Lintas Solo - Madiun	3.90	Km'sp
13	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 251+490 s.d Km. 243+200 sepanjang 8290 M'sp antara Palur – Kemiri Lintas Solo - Madiun	8.29	Km'sp
14	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 242+600 s.d 235+350 sepanjang 7290 M'sp antara Masaran - Sragen	7.25	Km'sp
15	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 233+350 s.d 228+100 sepanjang 5250 M'sp antara Masaran - Sragen	5.25	Km'sp
16	Pembangunan Jalan KA Km 350+400 - Km 354+000 sepanjang 3.600 M'sp antara Purwokerto - Notog (Multiyears 2015-2017)	3.60	Km'sp
17	Pembangunan Jalan KA Km 364+000 - Km 368+800 sepanjang 4.800 M'sp antara Kebasen - Randegan dan Penataan Emplasemen Stasiun Kebasen (Multiyears 2015-2017)	4.80	Km'sp
JUMLAH		114.59	Km'sp

Dari target pembangunan jalur KA sepanjang 114,59 Km'sp tersebut, realisasi jalur KA yang terbangun pada tahun 2016 sepanjang 33,99 Km'sp dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Pembangunan Jalur KA sepanjang 33,99 km

NO	Uraian Pekerjaan	Volume (Km'sp)
1	Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) di Km.66+925-Km.68+425 antara Maja - Rangkasbitung Sepanjang 1,50 Km'sp	1,50
2	Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) di Km.68+425-Km.69+925 antara Maja - Rangkasbitung Sepanjang 1,50 Km'sp	1,50
3	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 256+250 s.d Km. 252+300 sepanjang 3900 M'sp antara Palur – Kemiri Lintas Solo -Madiun	3,90
4	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 251+490 s.d Km. 243+200 sepanjang 8290 M'sp antara Palur – Kemiri Lintas Solo -Madiun	8,29

5	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 242+600 s.d 235+350 sepanjang 7290 M'sp antara Masaran - Sragen	7,25
6	Pekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km. 233+350 s.d 228+100 sepanjang 5250 M'sp antara Masaran - Sragen	5,25
7	Pembangunan Jalan KA Km 350+400 - Km 354+000 sepanjang 3.600 M'sp antara Purwokerto - Notog (Multiyears 2015-2017)	3,50
8	Pembangunan Jalan KA Km 364+000 - Km 368+800 sepanjang 4.800 M'sp antara Kebasen - Randegan dan Penataan Emplasemen Stasiun Kebasen (Multiyears 2015-2017)	2,80
Total		33,99

Analisis Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa kegagalan yang menyebabkan capaian target tidak tercapai adalah terdapat luasan tanah sebesar 2.892, 500 M² yang terdiri dari lahan milik PT. Perkebunan Nusantara III dan beberapa Perusahaan asing (PT. SMA, PT. LONSUM, PT. WISU, PT. HERFINTA) serta lahan Warga antara Rantauprapat - Kota Pinang sepanjang 58 Km'sp. Pengadaan lahan belum selesai dilaksanakan dikarenakan terkendala proses penetapan lokasi baru selesai pada bulan November 2016 dan Luasan lahan sebesar 4000 M² pemanfaatan lahan TNI Angkatan Udara antara Kota Pinang – Duri – Dumai sepanjang 20,50 Km'sp sampai dengan Desember 2016 masih dilakukan proses pemetaan dan penyusunan penetapan lokasi oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk ditetapkan oleh Gubernur.

Rincian kegiatan yang mengalami kegagalan yang menyebabkan capaian target tidak tercapai yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.23
Kegiatan Pembangunan Jalur KA yang Belum Tercapai pada Tahun 2016

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Hambatan
1	Pembangunan Jalan KA di Km. 0 + 000 s/d Km. 9+ 700	9.50	Km'sp	Pembangunan Jalur KA antara Rantau Prapat - Kota Pinang - Duri – Dumai, terkendala permasalahan Lahan
2	Pembangunan Jalan KA di Km. 9 + 700 s/d Km. 19+ 200	9.50	Km'sp	
3	Pembangunan Jalan KA di Km. 19 + 200 s/d Km. 28+ 900	9.60	Km'sp	
4	Pembangunan Jalan KA di Km. 28 + 900 s/d Km. 38 + 500 sepanjang 9.600 m'sp	9.60	Km'sp	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Hambatan
5	Pembangunan Jalan KA di Km. 38 + 500 s/d Km. 48 + 100 sepanjang 9.600 m'sp	9.60	Km'sp	
6	Pembangunan Jalan KA di Km. 48 + 100 s/d Km. 57 + 800 sepanjang 9.700 m'sp	9.70	Km'sp	
7	Pembangunan Jalan KA di Km. 236 + 000 s/d Km. 237 + 000 sepanjang 3.000 m'sp empl Dumai	3.00	Km'sp	
8	Pembangunan Jalan KA di Km. 227 + 000 s/d Km. 236 + 000 sepanjang 9.000 m'sp	9.00	Km'sp	
9	Pembangunan Jalan KA di Km. 218 + 000 s/d Km. 227 + 000 sepanjang 9.000 m'sp	9.00	Km'sp	

Alternatif Perbaikan Untuk Masa Depan

Upaya perbaikan ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, antara lain :

- Koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembebasan lahan;
- Saat ini telah dikeluarkan surat persetujuan pelepasan BMN oleh Menteri BUMN terkait pemanfaatan lahan milik PT. Perkebunan Nusantara III;
- Pada lintas Duri - Dumai dilakukan koordinasi intensif dengan TNI Angkatan Udara untuk ijin pemanfaatan lahan dari KSAU di tanah Satradar 232 Dumai;
- Pada tahun anggaran 2017-2019 tahun jamak telah di anggarkan untuk pembangunan jalur kereta api pada lintas Rantau Prapat – Kota Pinang – Duri – Dumai.

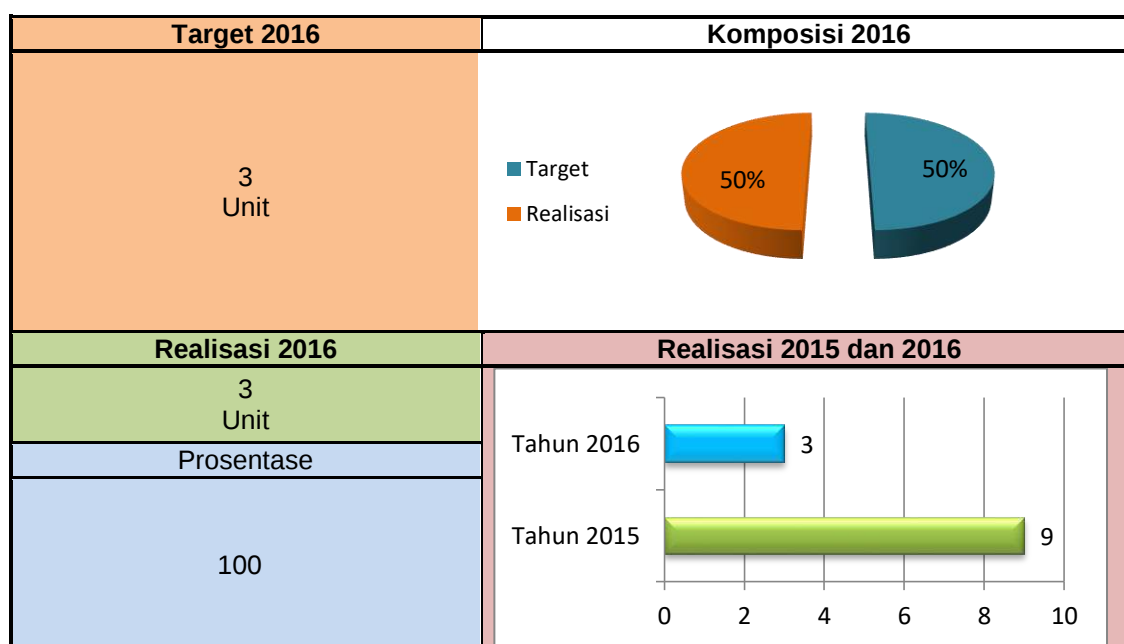
15. Capaian Indikator Kinerja Jumlah sarana kereta api

Capaian Indikator Kinerja Jumlah pengadaan sarana kereta api Tahun 2016 mencapai 100%. Analisis capaian disebutkan pada Tabel 3.21, Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.21

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Jumlah sarana kereta api

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah sarana kereta api	Unit	3	0	0	0	3	3	100

IKU 15 : Jumlah sarana kereta api



Gambar 3.14

Capaian Realisasi IKU No.15 Tahun 2016 Jumlah sarana kereta api

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pengadaan sarana tahun 2016 (Gambar 3.12) tidak mengalami kendala dalam proses konstruksi atau pengerjaan.

- Pengadaan Kereta Inspeksi lebar spoor 1.067 mm merupakan kegiatan Multiyears 2014-2016 sebanyak 2 (satu) unit telah selesai 100%, KA Inspeksi merupakan jenis kereta untuk memonitor kondisi Jalur KA di lintas, pengadaan tersebut dilakukan oleh PT.INKA dengan waktu yang sesuai dengan rencana. Selain hal tersebut KA Inspeksi digunakan sebagai Kereta Inspeksi (KAIS) yang biasa dipakai oleh Pejabat/Direksi dan Tamu Penting dan juga bila Presiden akan berpergian naik Kereta Api, KAIS inilah yang menjadi penarik yang berada di depan Kereta Kepresidenan;
- Pengadaan Kereta Ukur Prasarana (Track dan Listrik Aliran Atas) merupakan kontrak tahun jamak 2015-2016) sebanyak 1 unit telah selesai pada tahun anggaran 2016. Kereta Ukur digunakan untuk melakukan inspeksi terhadap rel di sepanjang jalur yang akan di inspeksi. Sehingga kondisi rel, kontur geometri dan seterusnya, mana linasan rel yang memerlukan perbaikan akan segera diketahui.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.24 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 100,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 36.964.895.000,- dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp.22.290.000,- dari realisasi sebesar Rp. 36.942.605.000,-

Tabel 3.25
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.13

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Tar-Get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-Angan (%)	Fisik (%)	Efisi-Ensi (%)
Jumlah sarana kereta api	3	36,964	36,942	0,022	99,94	100	100,06

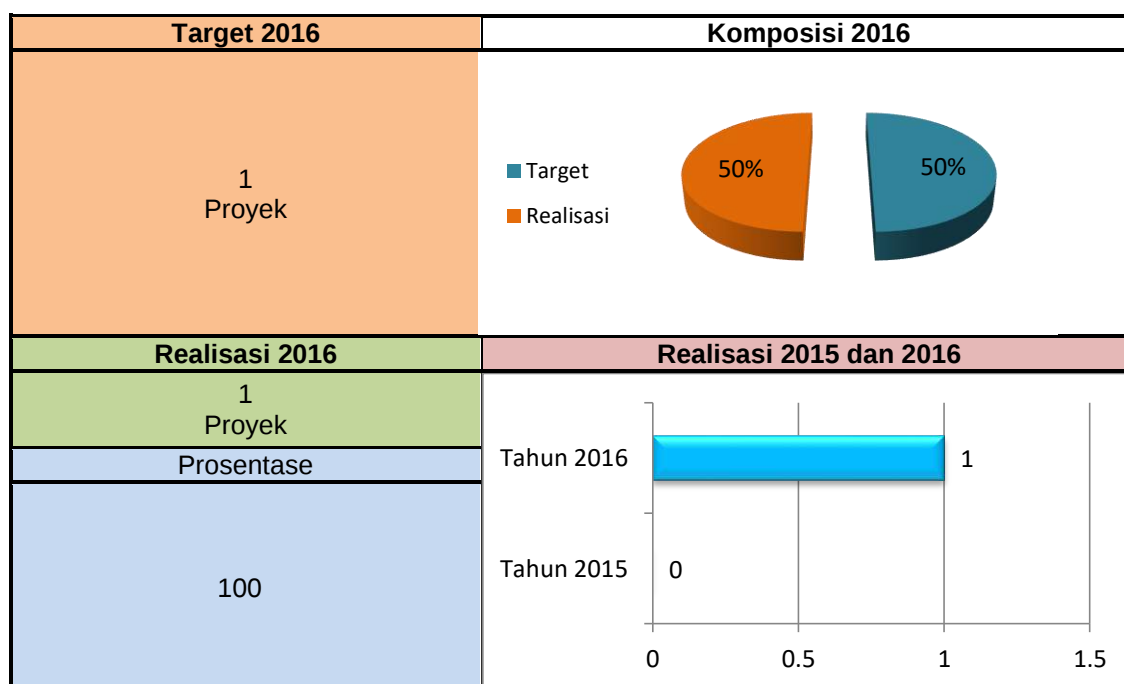
16. Capaian Indikator Kinerja Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian

Capaian Indikator Kinerja Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian sebesar 100%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.25

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	Proyek	1	1	1	1	1	1	100

IKU 16 : Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian



Gambar 3.15

Capaian Realisasi IKU No.16 Tahun 2016 Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian

Pada indikator Kinerja Utama “Terselenggaranya Proses KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian” dimaksudkan dalam mendukung Rencana Strategis (Renstra) dalam mewujudkan peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan keterpaduan dalam penyediaan sarana dan prasarana perkeretaapian nasional.

Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian tahun 2016 yang terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Persiapan

Meliputi penyiapan dokumen KPBU yang terdiri dari studi kelayakan (FS), detailed engineering design (DED), business plan dan trase. Dimana terkait proyek KPBU Tanjung Enim – Tanjung Api-api, penetapan trase merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Persetujuan Penetapan Trase oleh Menteri Perhubungan.

b. Pelelangan Badan Usaha

Tahap pelelangan proyek KPBU dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Dalam proyek KPBU Tanjung Enim – Tanjung Api-api, Pemprov Sumatera Selatan bertindak sebagai PJPK proyek KPBU Tanjung Enim – Tanjung Api-api.

c. Perjanjian/ Konsesi

Pada tahapan perjanjian/konsesi, PJPK melakukan negosiasi dengan Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang mengenai klausul perjanjian dan kondisi lainnya untuk mendapatkan perjanjian/ konsesi yang terbaik bagi negara. Perjanjian dilakukan berdasarkan konsesi, dimana setelah berakhirnya masa konsesi kepemilikan aset menjadi milik negara/ BMN.

d. Financial Closing

Finansial closing dan pembebasan tanah harus segera dilakukan oleh Badan Usaha terpilih dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku, setelah menandatangani perjanjian, agar dapat segera melakukan pembangunan fisik.

e. Pembangunan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Usaha dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, serta terlebih dahulu mendapatkan izin pembangunan dan persetujuan spesifikasi teknis sarana.

f. Pengoperasian

Pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian oleh Badan Usaha dilakukan setelah prasarana dan sarana perkeretaapian dinyatakan lulus uji kelayakan dan mendapatkan izin operasi prasarana dan izin operasi sarana.

Pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian oleh Badan Usaha dilakukan setelah prasarana dan sarana perkeretaapian dinyatakan lulus uji kelayakan dan mendapatkan izin operasi prasarana dan izin operasi sarana.

Di tahun 2016 terdapat 1 target yang ditetapkan pada revaluasi Perjanjian Kinerja (PK) 2016 berdasarkan target kinerja pada Renstra 2015-2019 yaitu Perkeretaapian Batubara Tanjung Enim – Tanjung Api-api. Target tersebut telah berhasil tercapai dengan adanya Persetujuan Penetapan Trase Jalur kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-api oleh Menteri Perhubungan tanggal 7 November 2016 (Triwulan IV).

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pada tahun 2016 terlaksananya Penyelenggaraan Proses kerjasama Pemerintah dan Swasta Perkeretaapian Batubara lintas Tanjung Enim – Tanjung Api-api sampai dengan penetapan trase berdasarkan :

- a) Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 551.6/1966/DISHUB/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Permohonan Persetujuan Teknis Trase Jalur Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-api Sumatera Selatan.
- b) Kajian teknis trase jalur Kereta Api lintas Tanjung Enim – Tanjung Api-api yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan teknis trase jalur kereta api sesuai dengan Peraturan Menteri Pehubungan No. 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur KA.

17. Capaian Indikator Kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api

Capaian Indikator Kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api Tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 6 trayek/lintasan/rute. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.27

Tabel 3.27

Capaian Kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api Tahun 2016

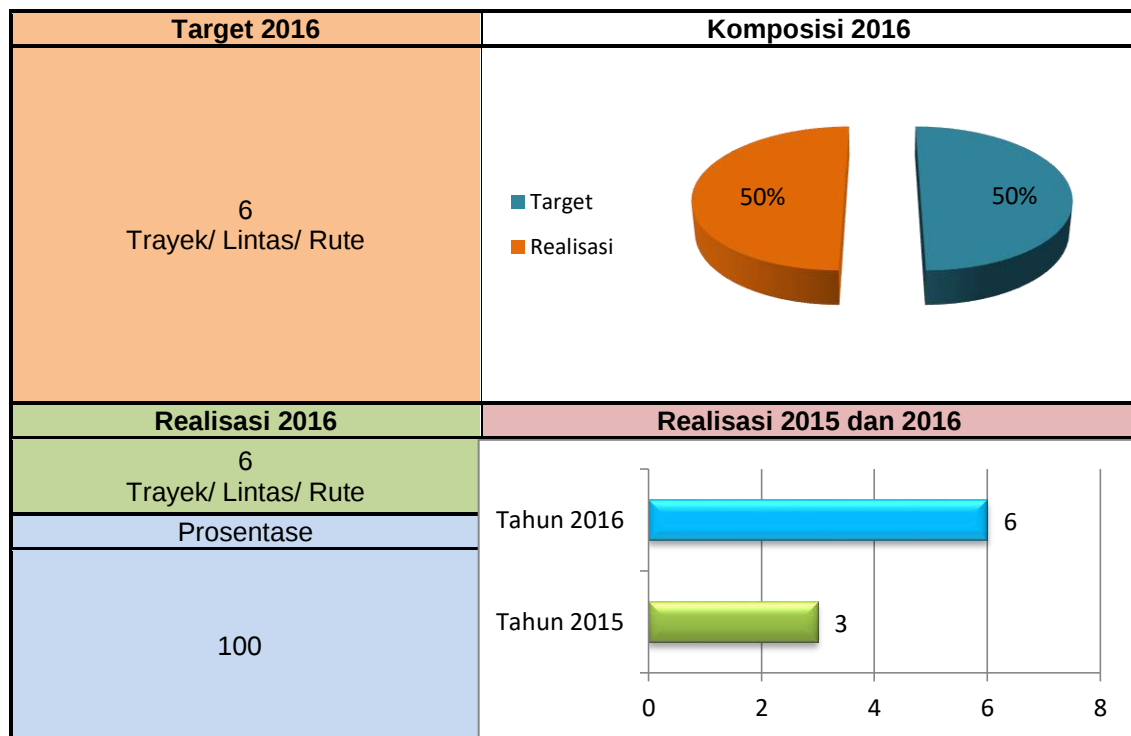
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api	Trayek/ Lintas/ Rute	6	4	4	6	6	6	100

Dalam rangka mencapai sasaran Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api terkait Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api. pada tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 159 tahun 2015 tentang penetapan lintas pelayanan perkeretaapian angkutan perintis terealisasi 100% sesuai dengan target lintasan angkutan kereta api yang ditetapkan sebanyak 6 lintas yaitu:

- a. Angkutan KA perintis Aceh lintas Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukeuh.
- b. Angkutan KA perintis lintas Lubuk Alung-Kayutanam.

- c. Angkutan KA perintis lintas Kertapati-Inderalaya.
- d. Angkutan KA perintis lintas Sukabumi-Cianjur.
- e. Angkutan KA perintis lintas Purwosari-Wonogiri.
- f. Angkutan KA perintis lintas Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo.

IKU 17 : Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api



Gambar 3.16

Capaian Realisasi IKU No.17 Tahun 2016 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Angkutan Perintis Perkeretaapian pada tahun 2016 dilaksanakan pada 6 lintas dengan tujuan meningkatkan pelayanan angkutan kereta api dan untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat serta membantu mobilisasi masyarakat dalam penyediaan jasa layanan transportasi kereta api, rincian sebagai berikut :

- a. Lintas Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukeuh

Angkutan KA perintis lintas Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukeuh resmi beroperasi pada tanggal 10 November 2016, dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas Krueng Mane – Bungkah – Krueng Geukeuh antara Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II

Wilayah Sumatera Barat Utara, Ditjen Perkeretaapian dan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak KT.01/KA-PRT/VIII/2016 dan KL.701/VIII/10/KA-2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.324.850.178. Pengoperasian KA Perintis lintas Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukeuh merupakan bagian dari program pemerintah (Kementerian Perhubungan) untuk membangun serta menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Aceh, dengan menggunakan transportasi Kereta Api, sebagaimana yang diarahkan dalam Nawacita. Adapun total jarak pelayanan KA perintis lintas Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukeuh sepanjang 11,35 Km dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 10 frekuensi perjalanan/hari dengan tarif yang diperlakukan sebesar Rp.1000. Sarana yang digunakan untuk melayani lintas ini adalah 1 set KRDI (Kereta Rel Diesel Indonesia) yang terdiri atas 2 kereta, dengan kapasitas 64 penumpang dengan tempat duduk dan 200 penumpang berdiri yang diproduksi oleh PT. INKA (Persero) yang diberikan nama KA Cut Mutia. Realisasi pelaksanaan KA Perintis Cut Mutia sebagai berikut :

Tabel 3.28
Realisasi KA Perintis Cut Mutia Aceh

Nama KA	Lintas	Kontrak (Rp)	Realisasi (RP)	%
KA Cut Mutia	Krueng Mane – Bungkah – Krueng Geukeuh (11,3)	13.324.850.178	10.570.338.748	79,33

b. Lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam

Angkutan KA perintis lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam resmi beroperasi pada tanggal 01 November 2016, dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam dilaksanakan antara Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Barat, Ditjen Perkeretaapian dan PT. KAI (Persero) dengan Nomor kontrak SP. 01/KA.PERINTIS-BTP SBB/VIIPHB-2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.163.200.000. Adapun total jarak pelayanan KA perintis lintas Lubuk Alung – Kayu sepanjang 20,34 Km dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 4 frekuensi perjalanan/hari dengan tarif yang diperlakukan sebesar Rp.3000. Sarana yang digunakan untuk melayani lintas ini adalah 1 trainset Railbus yang terdiri atas 2 kereta, dengan kapasitas 160 penumpang yang diproduksi oleh PT. INKA (Persero) yang diberikan nama KA Lembah Anai. Realisasi pelaksanaan KA Perintis Lembah Anai sebagai berikut :

Tabel 3.29
Realisasi KA Perintis Lembah Anai Sumatera Barat

Nama KA	Lintas	Kontrak (Rp)	Realisasi (RP)	%
KA Lembah Anai	Lubuk Alung – Kayu Tanam (20,34)	8.163.208.510	6.047.913.331	74,09

c. Lintas Kertapati-Inderalaya

Angkutan KA perintis lintas Kertapati-Inderalaya beroperasi sejak tahun 2015. Untuk pengoperasian 2016 dilaksanakan berdasarkan kontrak penugasan KA Perintis lintas Kertapati – Inderalaya antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Ditjen Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak HK.201/01/BTP.SUMBAGSEL/I/2016 HK.221/18/KA-2016 pada tanggal 12 Januari 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.108.055.611. Angkutan KA perintis lintas Kertapati-Inderalaya diperuntukan juga untuk angkutan mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang guna mendapatkan jasa layanan angkutan KA dengan nyaman, aman, dan tarif yang terjangkau. Adapun total jarak pelayanan KA perintis lintas Kertapati-Inderalaya sebesar 25,8 km dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 2 frekuensi dengantarif yang diberlakukan lintas Kertapati-Inderalaya sebesar Rp. 3.000,00. Sarana yang digunakan untuk angkutan perintis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) *train set Railbus* dengan kapasitas 292 penumpang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diproduksi oleh PT. INKA (Persero) yang diberikan nama KA Kertalaya. Realisasi pelaksanaan KA Perintis Kertalaya sebagai berikut :

Tabel 3.30
Realisasi KA Perintis Kertalaya

Nama KA	Lintas	Kontrak (Rp)	Realisasi (RP)	%
KA Kertalaya	Kertapati – Inderalaya (25,64)	4.108.056.000	4.108.055.611	100

d. Lintas Sukabumi-Cianjur

Angkutan KA perintis lintas Sukabumi-Cianjur beroperasi sejak tahun 2015. Untuk pengoperasian tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan kontrak penugasan KA Perintis

lintas Sukabumi-Cianjur antara Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Barat, Ditjen Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak PL.102/1/1/P/PK-RN/BTP-JABAR/KA-PERINTIS/I-2016 HK.221/I/19/KA-2016 pada tanggal 12 Januari 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.152.674.498. Adapun total jarak pelayanan KA perintis lintas Sukabumi-Cianjur sebesar 37,237 km dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 6 frekuensi setiap harinya dengan tarif yang diberlakukan lintas Sukabumi-Cianjur sebesar Rp. 3.000,00. Sarana yang digunakan untuk angkutan perintis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Stamformasi (4K3 dan 1KMP3) dengan kapasitas 472 penumpang yang diberikan nama KA Siliwangi. Realisasi pelaksanaan KA Perintis Siliwangi sebagai berikut :

Tabel 3.31
Realisasi KA Perintis Siliwangi Jawa Barat

Nama KA	Lintas	Kontrak (Rp)	Realisasi (RP)	%
KA Siliwangi	Sukabumi – Cianjur (37,24)	13.152.674.498	11.901.381.741	90,49

e. Lintas Purwosari-Wonogiri

Angkutan KA perintis lintas Purwosari-Wonogiri beroperasi sejak maret tahun 2015. Untuk pengoperasian tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan kontrak penugasan KA Perintis lintas Purwosari - Wonogiri antara Balai Teknik Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Ditjen Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak PL. 102/01/BTP/JTG-DIY/I/2016 HK.221/I/17/KA-2016 pada tanggal 12 Januari 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.396.763.172. Adapun total jarak pelayanan KA perintis lintas Purwosari-Wonogiri sebesar 36,67 km dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 4 frekuensi setiap harinya dengan tarif yang diberlakukan lintas Purwosari-Wonogiri sebesar Rp. 4.000,00. Sarana yang digunakan untuk angkutan perintis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) *train set Railbus* dengan kapasitas 117 penumpang yang diproduksi oleh PT. INKA (Persero) yang diberikan nama KA Bathara Kresna. Realisasi pelaksanaan KA Perintis Batarakresna sebagai berikut :

Tabel 3.32
Realisasi KA Perintis Batara Kresna

Nama KA	Lintas	Kontrak (Rp)	Realisasi (RP)	%
KA Batara Kresna	Purwosari – Wonogiri (36,67)	8.396.764.000	8.396.763.171	100

f. Lintas Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo

Angkutan KA perintis lintas Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo beroperasi sejak oktober tahun 2014. Untuk pengoperasian KA tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan kontrak penugasan KA Perintis lintas Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Ditjen Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak 01/LSK.SUB/BTP-JT/I/2016 HK.221/I/16/KA-2016 pada tanggal 12 Januari 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 26.607.699.926. Adapun total jarak pelayanan KA perintis lintas Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo sebesar 31,85 km dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 12 frekuensi setiap harinya dengan tarif yang diberlakukan lintas Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo sebesar Rp. 4.000,00. Sarana yang digunakan untuk angkutan perintis tersebut dengan menggunakan 2 (dua) *train set Railbus* dengan kapasitas 266 penumpang yang diproduksi oleh PT. INKA (Persero) yang diberikan nama KA Jenggala. Realisasi pelaksanaan KA Perintis Jenggala sebagai berikut :

Tabel 3.33
Realisasi KA Perintis Jenggala

Nama KA	Lintas	Kontrak (Rp)	Realisasi (RP)	%
KA Jenggala	Mojokerto –Tarik – Tulangan –Sidoarjo (31,85)	26.607.699.926	22.277.600.316	83,73

Dengan adanya KA Keperintisan diharapkan dapat mewujudkan terselenggaranya angkutan kereta api dengan tarif terjangkau sesuai dengan frekuensi, lintas pelayanan, transformasi, tempat duduk secara berjadwal, tercantum sesuai dengan pola perjalanan KA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan kereta api untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat serta membantu mobilisasi masyarakat dalam penyediaan jasa layanan transportasi dengan kereta api perintis.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.27 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 114,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.73.753.253.112,- dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp.10.451.200.194,- dari realisasi sebesar Rp. 63.302.052.918,-

Tabel 3.34

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada IKU No.15

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Efisiensi (%)
Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api	6	73,753	63,302	10,451	85,83	100	114,17

18. Capaian Indikator Kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial

Pada sasaran Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api khususnya indikator kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial, untuk target dan capaian di tahun 2016 tidak ditargetkan dan tidak terdapat kegiatan untuk lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial belum dapat terpenuhi dikarenakan belum adanya usulan dari pihak pemohon. hal ini masih dalam pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Tabel 3.35

Capaian Kinerja Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial	Trayek/ Lintas/ Rute	0	0	0	0	0	0	0

19. Capaian Indikator Kinerja Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api

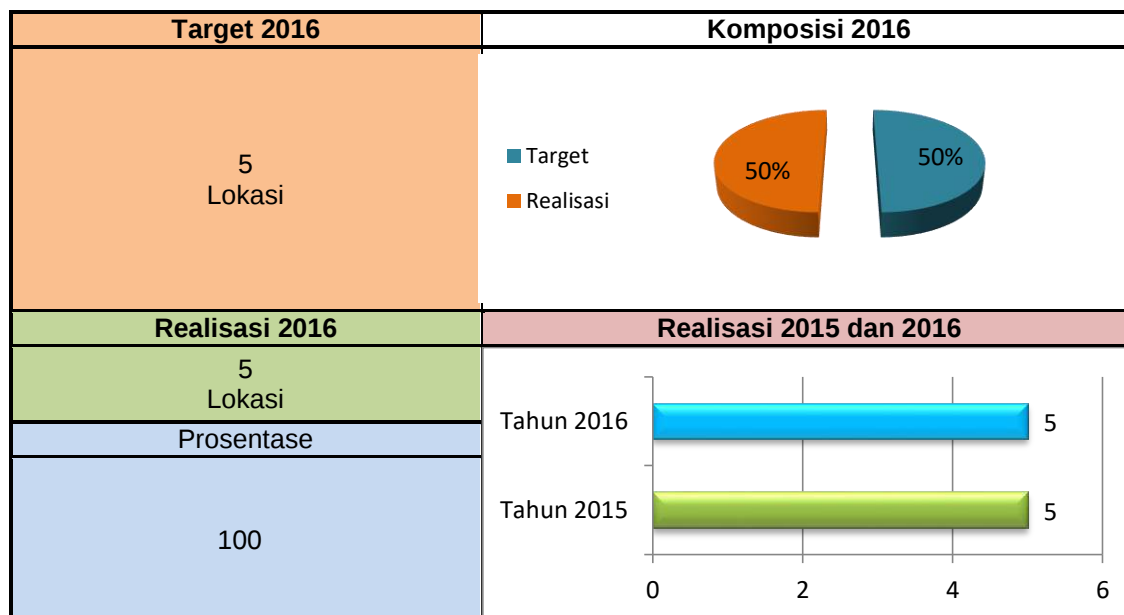
Pada Tahun 2016, Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api Tahun 2016 mencapai 100%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.36

Tabel 3.36

Capaian Kinerja Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api	Lokasi	5	5	5	5	5	5	100

IKU 19 : Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api



Gambar 3.17

Capaian Realisasi IKU No.19 Tahun 2016 Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan peran Kereta Api dalam Penyediaan Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan Rel pada tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 215 Tahun 2015 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. KAI Commuter Jabodetabek dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 434 Tahun 2016 TENTANG Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terealisasi 100% sesuai dengan target lokasi wilayah perkotaan yang menerapkan system angkutan massal berbasis kereta api ditetapkan dalam kinerja 2016 sebanyak 5 lokasi yaitu:

- a. Jabodetabek
- b. Yogya-Solo
- c. Bandung
- d. Surabaya
- e. Medan

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api pada tahun 2016, antara lain :

- a. Wilayah JABODETABEK

Pada daerah JABODETABEK (Jakarta Bogor Tangerang Bekasi) terdapat KRL (Kereta Rel Listrik) yang memiliki beberapa lintas pelayanan, misalnya Jakarta Kota – Bekasi, Jakarta Kota – Bogor, Tanah Abang – Maja, Tanah Abang – Tangerang. PT. KAI Commuter Jabodetabek merupakan operator yang mengoperasikan KRL Jabodetabek berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 215 Tahun 2015 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. KAI Commuter JABODETABEK, dengan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut PT. KAI Commuter JABODETABEK dapat mengoperasikan 28 lintas pelayanan di wilayah JABODETABEK untuk melayani masyarakat.

- b. Wilayah Yogya-Solo

Pada lintas Yogya – Solo realisasi perjalanan KA Perkotaan di tahun 2016 terdapat 4 kereta, diantaranya Sidomukti, Joglokerto, Sriwedari dan Prambanan Ekspres. KA Perkotaan di Yogya-Solo beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan Keputusan Menteri Perhubungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat mengoperasikan lintas pelayanan KA Perkotaan di wilayah tersebut untuk melayani masyarakat.

c. Wilayah Bandung

Pada wilayah perkotaan Bandung terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Kiaracondong – Cicalengka, yaitu Ekonomi Lokal Bandung Raya. KA Perkotaan di Bandung beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan Keputusan Menteri Perhubungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat mengoperasikan lintas pelayanan KA Perkotaan di wilayah tersebut untuk melayani masyarakat.

d. Wilayah Surabaya

Pada wilayah perkotaan Surabaya realisasi perjalanan KA Perkotaan di tahun 2016 terdapat 3 kereta, diantaranya Jenggala yang melayani lintas Surabaya – Mojokerto, Penataran yang melayani lintas Surabaya – Blitar dan Penataran II yang melayani lintas Surabaya – Malang. KA Perkotaan di Surabaya beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan Keputusan Menteri Perhubungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat mengoperasikan lintas pelayanan KA Perkotaan di wilayah tersebut untuk melayani masyarakat.

e. Wilayah Medan

Pada Wilayah perkotaan Medan terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Binjai – Medan yaitu Sri Lelawangsa. KA Perkotaan di Medan beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan Keputusan Menteri Perhubungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat mengoperasikan lintas pelayanan KA Perkotaan di wilayah tersebut untuk melayani masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Ditjen Perkeretaapian TA.2016 ialah sebagai berikut :

a. Total akhir alokasi dana Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.407.315.735.000-

b. Rincian Pagu setelah APBN-P per Sumber Dana :

1) Berdasarkan Sumber Pembiayaan:

Rupiah Murni	: Rp. 4.266.573.433.000.- (41,00%)
Pinjaman Luar Negeri	: Rp. 1.133.078.395.000.- (10,89%)
Rupiah Murni Pendamping	: Rp. 8.487.350.000.- (0,08%)
Hibah Luar Negeri	: Rp. 16.176.557.000.- (0,16%)
SBSN	: Rp. 4.983.000.000.000.- (47,88%)

2) Berdasarkan Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	: Rp. 74.067.159.000.- (0,71%)
Belanja Barang	: Rp. 2.022.194.053.000.- (19,43%)
Belanja Modal	: Rp. 8.311.054.523.000.- (79,86%)

c. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian Posisi 31 Desember 2016 :

Realisasi penyerapan DIPA TA. 2016 posisi 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 5.801.339.893.298.- (55,74 %)** terdiri dari :

1) Berdasarkan Sumber Pembiayaan:

Rupiah Murni	: Rp. 3.121.524.214.003.- (73,16%)
Pinjaman Luar Negeri	: Rp. 212.563.293.301.- (18,76%)
Rupiah Murni Pendamping	: Rp. 8.362.184.000.- (98,53%)
Hibah Luar Negeri	: Rp. 58.721.597.- (0,36%)
SBSN	: Rp. 2.458.831.480.397.- (49,34%)

2) Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp. 55.958.231.214.- (75,55%)
Belanja Barang	: Rp. 1.432.326.574.229.- (70,83%)
Belanja Modal	: Rp. 4.313.055.087.855.- (51,90%)

- d. Dengan Alokasi DIPA sebesar Rp. **9.641.375.403.000,-** (setelah dikurangi *Self Blocking* sebesar Rp.**765.940.332.000,-**), Realisasi Anggaran Tahun 2016 Ditjen Perkeretaapian Posisi 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 5.801.339.893.298.- (60,17%)**
- e. Total dana tidak terserap Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.841,19 Milyar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.37
Rincian Dana Tidak Terserap Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016

No	Uraian		Alokasi (Milyar Rupiah)
1	Pagu		10.407,32
2	Self Blocking		765,94
3	Pagu Setelah Self Blocking		9.641,38
4	Realisasi		5.801,19
5	Efisiensi	Sisa Belanja Pegawai	18,11
		Sisa Kontrak	240,95
		Sisa Dana Kegiatan	35,90
6	Non Efisiensi	Blokir Reguler	2,00
		Kegiatan Tidak Selesai	2.090,31
		Kegiatan Tidak Dilaksanakan	1.453,92
Total Dana Tidak Terserap			3.841,19

- f. Efisiensi pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
- Sisa Belanja Pegawai : Rp. 18,11 Miliar;
 - Sisa Kontrak : Rp.240,95 Miliar;
 - Sisa Dana Kegiatan : Rp. 35,90 Miliar (sisa dari perjalanan dinas, ATK, belanja bahan dan belanja pemeliharaan)
- g. Non Efisiensi pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
- Blokir Reguler : Rp.2,00 Miliar

Terdiri dari kegiatan antara lain :

- 1) (*Procurement of Track Material and Turn Out Phase II* (1500 km'sp & 500 unit Wesel) dan Pembangunan jalan sebesar Rp.1,00 Miliar dan;
- 2) Jembatan jalur ganda KA Padalarang-Cicalengka Phase 1 (satu) antara Padalarang-Gedebage sebesar Rp.1,00 Miliar)

- Kegiatan Tidak Selesai : Rp.2.090,31 Miliar

Terdiri dari kegiatan antara lain :

- 1) Paket A – Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai MYC 2015-2018 sebesar Rp. 709,81 Miliar;
- 2) Paket B.2.1 Modernisasi Fasilitas Perkeretaapian untuk Jatinegara-Bekasi sebesar Rp. 326,79 Miliar;
- 3) Paket B 1 Pengembangan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jakarta sebesar Rp. 884,24 Miliar;
- 4) Pembangunan Jembatan pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah sebesar Rp. 73,07 Miliar;
- 5) Pembangunan Elektrifikasi Jalur KA Antara Solo-Yogyakarta-Kutoarjo sebesar Rp. 51,22 Miliar;
- 6) Pembangunan Jalan Rel dan Emplesmen pada BTPW Jawa Bagian Tengah sebesar Rp.45,18 Miliar.

- Kegiatan Tidak Dilaksanakan : Rp.1.453,92 Miliar

Terdiri dari kegiatan antara lain :

- Kegiatan Tidak Dilaksanakan dari Belanja Barang sebesar Rp.12,30 Miliar, dengan rincian :
 - 1) Pengembangan Teknik Sarana Perkeretaapian sebesar Rp.11,78 Miliar, tidak dilaksanakan atas arahan Direktur Sarana Ditjen Perkeretaapian sehubungan dengan kebijakan Menteri Perhubungan untuk mengurangi dinas luar negeri pada Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian;
 - 2) Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.0,20 Miliar pada Satker Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - 3) Perawatan *Geismar* sebesar Rp. 0,32 Miliar.

- Kegiatan Tidak Dilaksanakan dari Belanja Modal sebesar Rp. 1.441,62 Miliar, dengan rincian :
 - 1) Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, yaitu :
 - a) Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Operasional Balai sebesar Rp. 6 Miliar;
 - b) Jasa Konsultansi desain Lintas Padalarang - Cicalengka *Phase 1* (Natixis) sebesar Rp. 20,73 Miliar;
 - c) Jasa Konsultansi BURTD, *Elektrifikasi* Padalarang - Cicalengka *Line Phase 1* (AFD) sebesar Rp. 13,20 Miliar;
 - 2) Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, yaitu :
 - a) Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa antara KM 95 + 300 - KM 98 + 000 antara Jg-Mn = 2,7 km'sp lintas Sgu-Slo (MYC 2016-2018) sebesar Rp.40,30 Miliar;
 - b) Pembangunan Jalur Ganda KA antara Madiun-Kedungbanteng Lintas Surabaya-Solo (MYC 2016-2018) sebesar Rp.3,79 Miliar;
 - c) Reaktivasi jalur tram (angkutan perkotaan) Surabaya (MYC 2016-2018) sebesar Rp.25,97 Miliar;
 - 3) Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah yaitu Pembangunan Elektrifikasi Jalur KA antara Solo-Yogyakarta-Kutoarjo (RM) sebesar Rp.15 Miliar;
 - 4) Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api, yaitu kegiatan Kegiatan Engineering Services of Surabaya Regional Railway Line sebesar Rp.13,6 Miliar;
 - 5) Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, meliputi :
 - a) Pembangunan Jalan KA di Km.0+000 s/d Km.9+700 antara Rantau Prapat - Kota Pinang (Paket TRS-1) sebesar Rp. 24,62 Miliar;
 - b) Pembangunan Jalan KA di Km.9+700 s/d Km.19+200 antara Rantau Prapat - Kota Pinang (Paket TSR-2) sebesar Rp. 30,31 Miliar;
 - c) Pembangunan Jalan KA di Km.19+200 s/d Km.28+900 antara Rantau Prapat - Kota Pinang (Paket TRS-3) sebesar Rp. 30,47 Miliar;

- d) Pembangunan Jalan KA di Km.28+900 s/d Km.38+500 antara Rantau Prapat - Kota Pinang (Paket TSR-4) sebesar Rp. 30,36 Miliar;
 - e) Pembangunan jalan KA layang antara Medan - Araskabu – Kualanamu sebesar Rp. 730,51 Miliar karena Penertiban kios buku tidak dapat dilaksanakan karena masih menunggu Surat Keputusan relokasi dari Walikota Medan;
 - f) Supervisi pekerjaan konstruksi Rantau Prapat - Kota Pinang - Duri - Dumai (Paket KTRS-1) sebesar Rp. 1,77 Miliar karena terkendala lahan.
- 6) Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian, meliputi Pengembangan Teknis Sarana Perkeretaapian sebesar Rp.11,78 Miliar;
 - 7) Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, meliputi : Pembangunan Kereta Api Ringan terintegrasi wilayah Jabodebek (termasuk supervisi) sebesar Rp. 35,00 Miliar;
 - 8) Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, meliputi : Pembangunan Jalur ganda Martapura-Baturaja (Kontrak Tahun Jamak) termasuk supervisi sebesar Rp. 408,21 Miliar.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Ditjen Perkeretaapian maupun Kementerian Perhubungan Tahun anggaran 2016 dengan sejumlah capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis akuntabilitas kinerja berdasarkan perencanaan kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan dan komitmen dokumen perjanjian kinerja 2016 yang dalam proses pelaksanaan memungkinkan adanya revisi perjanjian kinerja.

Hasil capaian kinerja 2016 melalui sasaran yang ditetapkan secara umum belum sepenuhnya memenuhi target yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau dari rata-rata tingkat pencapaian 8 (delapan) sasaran dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian tahun 2016 didapat sebesar 98,34%. Rincian capaian dari 19 IKU tersebut dapat sarikan hasilnya sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang **memenuhi dan melebihi** target yang ditetapkan antara lain :
 - 1) Capaian Kinerja 100% sebanyak 8 (delapan) IKU, antara lain :
 - a) Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian (100%);
 - b) Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang (100%);
 - c) Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (100%);
 - d) Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) (100%);
 - e) Jumlah sarana kereta api (100%);

- f) Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian (100%);
 - g) Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api (100%);
 - h) Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api (100%).
- 2) Capaian Kinerja diatas 100% sebanyak 3 (tiga) IKU yaitu
- a) Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (156,36%);
 - b) Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu) (188,19%) dan
 - c) Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian (702,31%).
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang **tidak memenuhi** target yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) IKU, antara lain :
- a) Jumlah Penumpang KA PSO (98,15%);
- Tidak tercapai dikarenakan adanya Perubahan frekuensi KA akibat adanya bencana alam serta ketidaksesuaian jumlah Stamformasi realisasi dibandingkan dengan Stamformasi kontrak atau Stamformasi realisasi biasanya lebih rendah dibandingkan dengan Stamformasi kontrak.
- b) Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian (72,23%);
- Tidak tercapai dikarenakan Keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi dan masih minimnya jumlah Assessor pengujian.
- c) Terbangunnya jalur kereta api (29,66%);
- Tidak tercapai dikarenakan terkendala permasalahan pengadaan lahan.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak ditargetkan atau tidak terdapat kegiatan pada tahun 2016, antara lain :
- a) Jumlah pedoman standar keselamatan (0%);

- b) Tingkat Ketersediaan ATP (0%);
- c) Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) (0%);
- d) Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan;
- e) Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan (0%);
- f) Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial (0%).

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan kereta api dalam pelaksanaan keterbatasan anggaran dari APBN/ APBN-P diperlukan strategi melalui pendanaan lain agar rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik, pendanaan melalui konsep kerja sama swasta dan pemerintah daerah Provinsi/Kota/Kabupaten dapat dioptimalkan seiring dengan peningkatan peraturan yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan jumlah sarana yang akan digunakan sebagai cadangan pada saat adanya perawatan sehingga tidak menyebabkan perubahan stamformasi kereta yang dijalankan.
3. Pembangunan *Double-Double Track* yang dimaksudkan dapat memisahkan antara jalur KA Jarak jauh dengan KRL Jabodetabek sehingga mengurangi antrian kereta penyebab keterlambatan.
4. Penambahan jumlah Asesor pengujian sehingga dapat dilaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi dengan peserta Uji lebih banyak dan waktu pelaksanaan yang bisa lebih optimal.
5. Dalam hal Terbangunnya jalur kereta api, yang masih terkendala dikarenakan permasalahan lahan, perlu adanya koordinasi yang intensif dengan Instansi terkait.

6. Dalam rangka mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional diperlukan pembinaan dan pengawasan kepada operator khususnya aturan dan kebijakan pola operasi serta perbaikan infrastruktur.

LAMPIRAN A
RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2016

VISI : Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional.

- MISI :**
1. Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi kereta api perkeretaapian;
 2. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kinerja pelayanan transportasi kereta api;
 3. Meningkatkan profesionalisme SDM dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkeretaapian;
 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 5. Memperluas peran perkeretaapian terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

NO	SASARAN KEMENHUB	SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA
I. Keselamatan dan Keamanan			
A	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian	a). Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api
			b). Jumlah pedoman standar keselamatan
			c). Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi kereta api 1. Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian 2. Tingkat Ketersediaan ATP 3. Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang
			d). Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian
B	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	e). Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)

NO	SASARAN KEMENHUB	SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA
II. Pelayanan			
C	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian	f). Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)
D	Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance	4. Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan good governance	g). Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian h). Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) i). Jumlah Penumpang KA PSO
E	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.	5. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi perkeretaapian	j). Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan
			k). Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan
III. Kapasitas Transportasi			
F	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	6. Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional	l). Terbangunnya jalur kereta api
			m). Jumlah sarana kereta api
			n.) Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian
G	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia	7. Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	o). Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api
			p). Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial
H	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	8. Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel	q). Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA
DITJEN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2016

Unit Organisasi Eselon I : DITJEN PERKERETAAPIAN
Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN KEMENHUB	SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA	TARGET		TARGET (REVISI PK)	
I. Keselamatan dan Keamanan							
A	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian	a). Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	0.55	Ratio kecelakaan/ 1 juta km	0.55	Ratio kecelakaan/ 1 juta km
			b). Jumlah pedoman standar keselamatan	0 Dokumen		0 Dokumen	
			c). Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi kereta api				
			1. Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	67	Unit	1	Unit
			2. Tingkat Ketersediaan ATP	0	Unit	0	Unit
			3. Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	0	Lokasi	3	Lokasi
			d). Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	1525	Sertifikat	4448	Sertifikat
B	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	e). Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)	288	Jumlah Kejadian / Tahun	288	Jumlah Kejadian / Tahun
II. Pelayanan							
C	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian	f). Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)	0	Dokumen	0	Dokumen
D	Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance	4. Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan good governance	g). Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	20	Prosentase (%)	20	Prosentase (%)
			h). Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	1	Tahun	1	
			i). Jumlah penumpang KA PSO	335,129,530	Penumpang	335,129,530	
E	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.	5. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi perkeretaapian	j). Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	0.476	Juta ton CO2e	0.476	Juta ton CO2e
			k). Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	0 Lokasi		0	Lokasi

NO	SASARAN KEMENHUB	SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA	TARGET	TARGET (REVISI PK)
III. Kapasitas Transportasi					
F	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	6. Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional	l). Terbangunnya jalur kereta api	174.3 Km'sp	114.59 Km'sp
			m). Jumlah sarana kereta api	3 Unit	3 Unit
			n.) Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	1 Proyek	1 Proyek
G	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia	7. Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	o). Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api	4 Trayek/ Lintas/ Rute	6 Trayek/ Lintas/ Rute
			p). Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial	0 Trayek/ Lintas/ Rute	0 Trayek/ Lintas/ Rute
H	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	8. Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel	q). Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api	5 Lokasi	5 Lokasi

Kegiatan	Anggaran
1. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	Rp. 121.681.365.000,-
2. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp. 190.392.227.000,-
3. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api	Rp. 9.842.661.389.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rp. 171.818.876.000,-
5. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 80.761.878.000,-

LAMPIRAN C
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA DITJEN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2016

Unit Organisasi Eselon I : DITJEN PERKERETAAPIAN
 Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN KEMENHUB	SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA	TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM	ANGGARAN		
								PAGU	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Keselamatan dan Keamanan										
A	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian	a). Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	0.55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km	0.24 Ratio kecelakaan/ 1 juta km	156.36%	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	10,407,315,735,000	5,801,339,893,298	55.74%
			b). Jumlah pedoman standar keselamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%				
			c). Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi kereta api							
			1. Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	1 Unit	1 Unit	100.00%				
			2. Tingkat Ketersediaan ATP	0 Unit	0 Unit	0.00%				
			3. Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	3 Lokasi	3 Lokasi	100.00%				
			d). Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	4448 Sertifikat	3213 Sertifikat	72.23%				
B	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	e). Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)	288 Jumlah Kejadian / Tahun	34 Jumlah Kejadian / Tahun	11.81%				

NO	SASARAN KEMENHUB	SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA	TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM	ANGGARAN		
II. Pelayanan										
C	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian	f). Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%				
D	Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance	4. Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan <i>good governance</i>	g). Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	20 Prosentase (%)	20 Prosentase (%)	100.00%				
			h). Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	1 Tahun	1 Tahun	100.00%				
			i). Jumlah penumpang KA PSO	335,129,530 Penumpang	328,932,825 Penumpang	98.15%				
E	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.	5. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi perkeretaapian	j). Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	0.476 Juta ton CO2e	3.343 Juta ton CO2e	702.31%				
			k). Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	0 Lokasi	0 Lokasi	0.00%				
III. Kapasitas Transportasi										
F	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	6. Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional	l). Terbanquannya jalur kereta api	114.59 Km'sp	33.99 Km'sp	29.66%				
			m). Jumlah sarana kereta api	3 Unit	3 Unit	100.00%				
			n). Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	1 Proyek	1 Proyek	100.00%				
G	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia	7. Mewujudkan peningkatan Aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	o). Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis kereta api	6 Trayek/ Lintas/ Rute	6 Trayek/ Lintas/ Rute	100.00%				
			p). Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api perintis menjadi komersial	0 Trayek/ Lintas/ Rute	0 Trayek/ Lintas/ Rute	0.00%				
H	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	8. Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel	q). Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api	5 Lokasi	5 Lokasi	100.00%				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						98.45%				

Kegiatan	Anggaran
1. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	Rp. 121.681.365.000,-
2. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp. 190.392.227.000,-
3. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api	Rp. 9.842.661.389.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rp. 171.818.876.000,-
5. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 80.761.878.000,-

LAMPIRAN D
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DITJEN PERKERETAAPIAN
TRIWULANAN TAHUN 2016

Unit Organisasi Eselon I : DITJEN PERKERETAAPIAN
 Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN KEMENHUB	SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA	SATUAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2015					%
						TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif/Rata-rata	
I. Keselamatan dan Keamanan											
A	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian	a). Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	Ratio kecelakaan/ 1 juta km	0.55	0.26	0.26	0.32	0.24	0.24	156.36%
			b). Jumlah pedoman standar keselamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0.00%
			c). Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi kereta api								
			1. Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	Unit	1	0	0	0	1	1	100.00%
			2. Tingkat Ketersediaan ATP	Unit	0	0	0	0	0	0	0.00%
			3. Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	Lokasi	3	0	0	0	3	3	100.00%
			d). Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	Sertifikat	4448	776	1120	1930	3213	3213	72.23%
B	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	e). Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu)	Jumlah Kejadian / Tahun	288	9	12	17	34	34	188.19%

